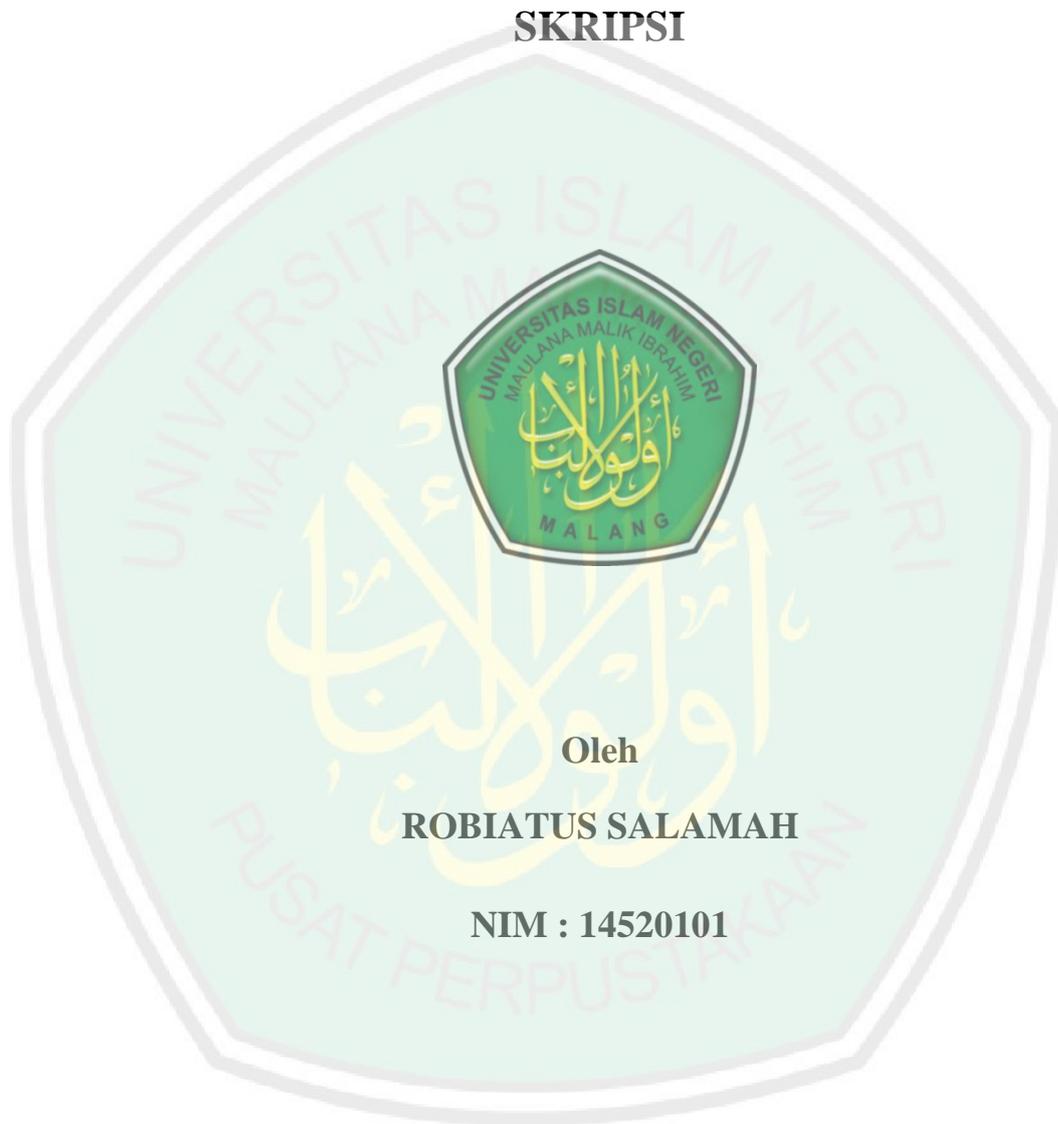


**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP  
PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN PADA  
PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI LQ45**

**SKRIPSI**



Oleh

**ROBIATUS SALAMAH**

**NIM : 14520101**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2018**

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP  
PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN PADA  
PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI LQ45**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

**ROBIATUS SALAMAH**

**NIM : 14520101**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2018**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP  
PRNGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN PADA  
PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI LQ45**

**SKRIPSI**

Oleh

**ROBIATUS SALAMAH**

NIM : 14520101

Telah disetujui pada tanggal 06 April 2018

Dosen Pembimbing,

  
**Sri Andriani, SE., M.Si**

NIP. 19750313 200912 2 001

Mengetahui :

Ketua Jurusan,



**Dr. H. Nani R. Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA**

NIP. 19720322 200801 2 005

## LEMBAR PENGESAHAN

### PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI LQ45

#### SKRIPSI

Oleh

**ROBIATUS SALAMAH**  
NIM : 14520101

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Dan Dinyatakan Diterima Sebagai  
Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Pada Tanggal 25 Juni 2018

#### Susunan Dewan Penguji

1. Ketua

Ulfi Kartika Oktaviani, SE., M.Ec., Ak., CA

NIP 19761019 200801 2 011

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Sri Andriani, SE., M.Si

NIP 19750313 200912 2 001

3. Penguji Utama

Fani Firmansyah, SE., MM

NIP 19770123 200912 1 001

#### Tanda Tangan

(  )

(  )

(  )

Disahkan Oleh :

Ketua Jurusan,



Dr. Hj. Nanik Wahyuni SE., M.Si., Ak., CA

NIP 19720322 200801 2 005

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Robiatus Salamah  
NIM : 14520101  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI LQ45** adalah hasil karya sendiri, bukan “duplikasi” karya orang lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 27 Juni 2018

Hormat saya,



Robiatus Salamah

NIM : 14520101

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Bismillah... puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala nikmat-Nya karya ini dapat selesai tepat waktu. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad atas petunjuk dan ketauladanannya.*

*Dengan penuh suka cita, Skripsi ini ku persembahkan untuk:*

### *KELUARGA TERCINTA*

*Ayahanda (H. Abdillah Anas) & Ibunda (Hj. Izzatun Nisa') yang selalu menjadi motivasi utamaku dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas do'a Ayah & Ibu yang tak pernah berhenti mendoakan yang terbaik buat ku, dukungan yang menguatkan ku dikala bimbang, terimakasih atas kepercayaannya selama ini.*

*Teruntuk saudara-saudaraku (Sodari Kece)*

*Terimakasih telah mendo'a kan ku, memberikan masukan, dukungan kepadaku.*

*You'r the greatest gift that god ever gave*

### *TEMAN-TEMAN TERDEKATKU*

*Terimakasih aku ucapkan kepada teman-teman ku jurusan akuntansi UIN malang 2014, terimakasih juga kepada emak, petrik, caum selaku teman seperjuangan yang memberikan motivasi serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi.*

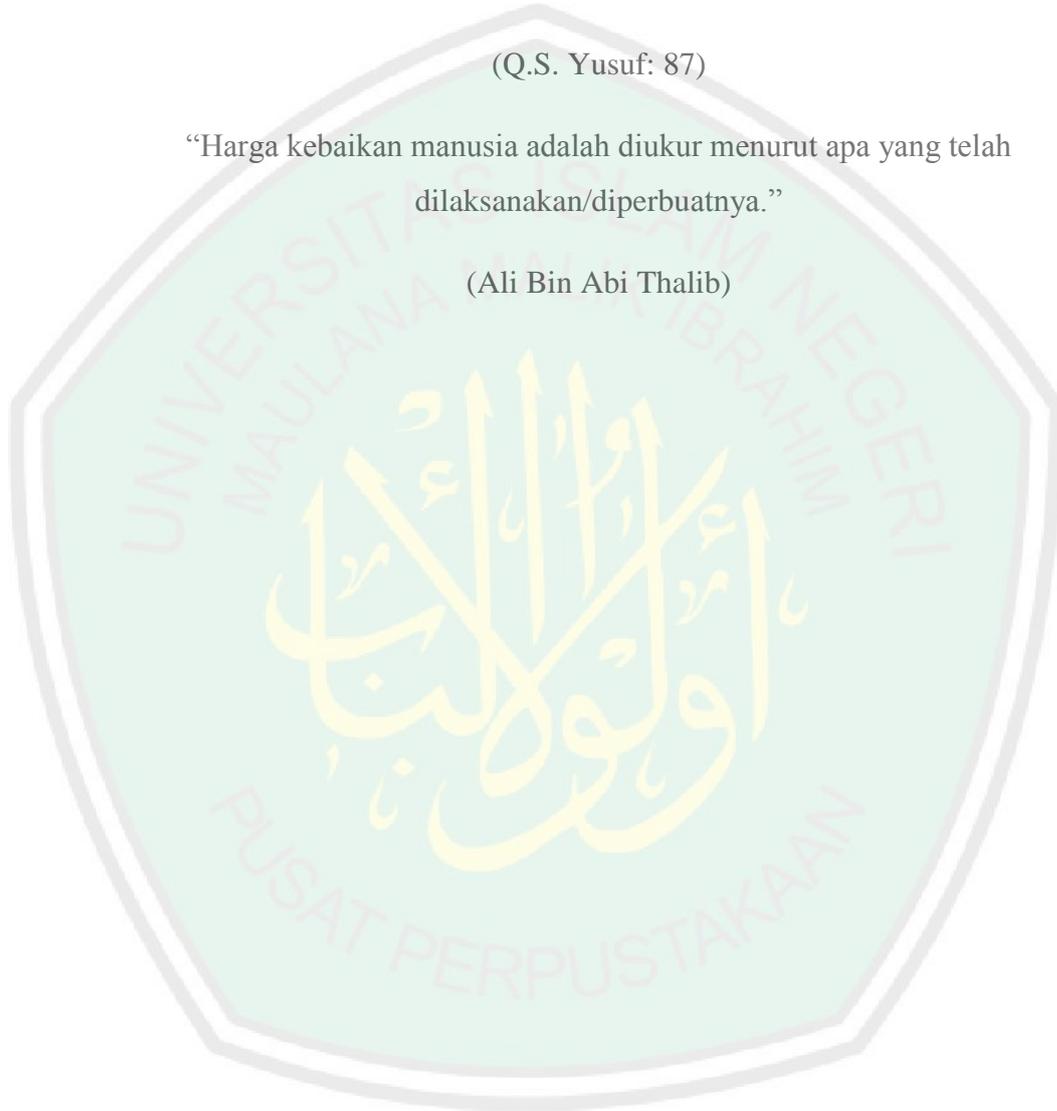
## HALAMAN MOTTO

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmt Allah melainkan orang-orang yang kufur (terhadap karunia Allah).”

(Q.S. Yusuf: 87)

“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan/diperbuatnya.”

(Ali Bin Abi Thalib)



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di LQ45”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Sri Andriani, SE., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dalam membimbing selama proses skripsi selama ini dan memberikan arahan dalam penyusunan proposal skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ayah H. Abdillah Anas, dan Ibu Hj. Izzatun Nisa' yang senantiasa memberikan do'a, pengertian, dan dukungan.

7. Sodari kece yang memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi..
8. Teman-teman Akuntansi angkatan 2014 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
9. Sahabat-sahabat tersayang Rena, Sauma, Fitri, Puspa, Kinori yang selalu memberikan Support selama mengerjakan skripsi.
10. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari adanya ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhirnya, penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak lain yang membutuhkan, Amin ya Rabbal ‘Alamin...

Malang, 05 April 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b>	
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
ABSTRAK .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	6
1.3.2. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu .....	8
2.2. Kajian Teoritis.....	18
2.2.1. <i>Good Corporate Governance</i> .....	18
2.2.1.1. Pengertian <i>Good Corporate Governance</i> .....	18
2.2.1.2. Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .....	22
2.2.1.3. Manfaat <i>Good Corporate Governance</i> .....	23
2.2.1.4. Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> .....	25
2.2.1.5. Kajian Islam <i>Good Corporate Governance</i> .....	27

2.2.2. Teori Stakeholder .....	32
2.2.3. Pajak.....	34
2.2.3.1. Fungsi Pajak .....	36
2.2.3.2. Sistem Pemungutan Pajak .....	37
2.2.3.3. Pajak Penghasilan .....	37
2.2.4. Penghindaran Pajak.....	40
2.3. Kerangka Konseptual .....	43
2.4. Hipotesis Penelitian.....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	47
3.2. Lokasi Penelitian .....	47
3.3. Populasi dan Sampel .....	47
3.4. Teknik Pengambilan Sampel.....	48
3.5. Data dan Jenis Data .....	49
3.6. Definisi Operasional variabel.....	50
3.6.1 Variabel Dependen.....	50
3.6.2 Variabel Independen .....	51
3.6.2.1 Dewan Komisaris Independen .....	51
3.6.2.2 Kepemilikan Institusional.....	52
3.6.2.3 Kepemilikan Manajerial .....	52
3.7. Teknik Analisis Data.....	53
3.7.1 Statistik Deskriptif .....	53
3.7.2 Uji Asumsi Klasik.....	53
3.7.2.1 Uji Normalitas .....	54
3.7.2.2 Uji Multikolinieritas .....	54
3.7.2.3 Uji Autokorelasi .....	55
3.7.2.4 Uji Heteroskedastisitas .....	55
3.7.3 Uji Hipotesis .....	56
3.7.3.1 Uji Koefisien Determinasi .....	57
3.7.3.2 Uji Simultan (uji F) .....	57
3.7.3.3 Uji Model Regresi Secara Parsial (uji T) .....	58

3.7.3.4 Penentuan Variabel yang Paling Dominan.....	58
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Hasil Penelitian .....	59
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	59
4.1.2 Hasil Analisis Deskriptif .....	62
4.1.3 Hasil Uji Asumsi Klasik .....	63
4.1.3.1 Uji Normalitas .....	63
4.1.3.2 Uji Multikolonieritas .....	66
4.1.3.3 Uji Autokorelasi .....	67
4.1.3.4 Uji Heteroskedastisitas .....	68
4.1.4 Hasil Uji Hipotesis .....	70
4.1.4.1 Koefisien Determinasi .....	72
4.1.4.2 Uji Simultan (Uji F).....	73
4.1.4.3 Uji Model Regresi Secara Parsial (Uji T).....	74
4.1.4.4 Penentuan Variabel yang Paling Dominan.....	75
4.2. Pembahasan.....	76
4.2.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak .....	76
4.2.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak .....	78
4.2.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak .....	79
<b>BAB I PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan .....	81
5.2. Keterbatasan Penelitian .....	81
5.3. Saran .....	82

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu .....	8
Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian .....	14
Tabael 3.1 Kriteria Pengambilan Sampel .....	49
Tabel 4.1 Proses Penentuan Sampel .....	61
Tabel 4.2 Perusahaan yang menjadi Sampel Penelitian .....	62
Tabel 4.3 Hasil Statistik Deskriptif .....	62
Tabel 4.4 Hasil Uji Asumsi Normalitas Variabel Dependen dan Independen .....	64
Tabel 4.5 Hasil Uji Asumsi Normalitas .....	65
Tabel 4.6 Hasil Uji Asumsi Multikolonieritas .....	66
Tabel 4.7 Hasil Uji Asumsi Non-Autokorelasi .....	68
Tabel 4.8 Durbin-Watson .....	68
Tabel 4.9 Hasil Uji Glejser .....	70
Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Linier Berganda .....	71
Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	73
Tabel 4.12 Hasil Uji Simultan (Uji F) .....	73
Tabel 4.13 Hasil Uji Parsial (Uji T) .....	74
Tabel 4.14 Ringkasan Hasil Analisis Regresi .....	75

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak.....	1
Gambar 2.1 Skema Pemikiran.....	43
Gambar 4.1 Histogram.....	65
Gambar 4.2 Normal P-P Plot.....	65
Gambar 4.3 Scatter Plot.....	69



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Bukti Konsultasi
- Lampiran 2 : Biodata Penulis
- Lampiran 3 : Daftar Sampel Perusahaan
- Lampiran 4 : Daftar Perhitungan Variabel Independen dan Variabel Dependen tahun 2014-2016
- Lampiran 5 : Tabel Durbin-Watson (DW) 5%
- Lampiran 6 : Hasil Uji SPSS



## ABSTRAK

Robiatus Salamah. 2018, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di LQ45 Tahun 2014-2016.”

Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si

Kata Kunci : Penghindaran Pajak, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial

---

Penghindaran Pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap penghindaran pajak, dimana *Good Corporate Governance* meliputi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Pembentukan *Good Corporate Governance* merupakan upaya untuk mengawasi kinerja perusahaan agar usaha-usaha yang dilakukan tidak melanggar undang-undang. *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh yang penting mengenai kebijakan pajak perusahaan serta memastikan agar tata kelola perusahaan terutama dalam hal perpajakan tetap dalam koridor penghindaran pajak yang bersifat legal bukan yang bersifat ilegal.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang terdapat di website LQ45. Populasi penelitian ini berjumlah 45 perusahaan dari tahun 2014-2016. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel yang diperoleh sebanyak 17 perusahaan. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan diolah dengan menggunakan *software* SPSS versi 20.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Hasil pengujian hipotesis model regresi secara simultan terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel independen yaitu Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial terhadap variabel dependen yaitu Penghindaran Pajak. (2) hasil pengujian secara parsial antara dewan komisaris independen dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh negative dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

## ABSTRACT

Salamah, Robiatus. 2018. THESIS. Tittle: “The Influence of Good Corporate Governance toward The Avoidance of The Company Tax on Company register in LQ45 .”

Supervisor : Sri Andriani, SE., M.Si

Keyword : The Tax Avoidance, The Board Of Independent Commissioner, Ownership Institusional, Ownership Manajerial.

---

The Tax Avoidance is the efforts to relieve the load of tax, with not breaking the law. The purpose of this research is to know how great the influence of *good corporate governance* of the avoid tax, which *good corporate governance* are the board of commissioner independent, the ownership of institusional, and the ownership of manajerial, about the tax avoidance. The establishment of *good corporate governance* is the efforts to control on performance. Of the company so that the effort is not breaking the law. *Ggod corporate governance* has the influence which is very important about the policy of the company tax and make sure so that the governance of the company in terms of the tax exactly still in corridor of the tax avoidance that is legal isn't ilegal.

This research is a quantitativ research with using of secondary is gotten from financial report annual data on the website LQ45. The population of this research is 45 company in 2014 until 2016. The way of taking data or collect the sample research use a technique persuasive sampling. The sampling is gotten as many as 17 company. The data reported by using multiple linear regression analysis and processed using of SPSS software version 20.

The results of this research show that (1) the results hypothesis test model in regression is simultaneously, it is got the positive influence of significant between variable independent like the board of commissioner independent, the ownership of institusional, and the ownership of managerial toward dependent is the avoidance tax. (2) the results test partial between the board of commissioner independent, and the ownership of managerial toward the avoidance tax is positive effect and significant toward the avoidance tax.

## المخلص

عنوان البحث: تأثير *Good Corporate Governance* في التهرب الضريبي على الشركات المسجلة في LQ45.

إعداد: ربيعة السلمة

المشرف: سري أندرياني

الكلمة الرئيسية: التهرب الضريبي، مجلس المفوضين المستقل، ملكية المؤسسة، الملكية الإدارية.

التهرب من الضريبة أو ما يصطلح عليه بالتهرب الضريبي يعتبر محاولة قانونية لتخفيف نسبة الضريبة المستحقة وفق القانون المسير. وهذا البحث يهدف إلى معرفة مدى تأثير *Good Corporate Governance* في التهرب الضريبي، حيث إن *Good Corporate Governance* له سلطة في مجلس المفوضين المستقل، وفي ملكية المؤسسة، والملكية الإدارية. وكان في إنشاء *Good Corporate Governance* دور فعال لمراقبة الشركات عند مزاولتها التجارية لينتظم مع القوانين. وأيضاً إن *Good Corporate Governance* له تأثير هام على سياسة الشركات وقراراتها فيما يتعلق بالتهرب الضريبي القانوني وغير القانوني.

هذا البحث عبارة عن بحث كمي باستخدام بيانات ثانوية تم الحصول عليها من البيانات المالية السنوية الواردة في موقع LQ45. وبلغ عدد سكان هذه الدراسة إلى 45 شركة من 2014-2016، وهذا البحث يستخدم أسلوب *purposive sampling* في تحليل العينات التي تتكون من 17 شركة. وتم تحليل بيانات البحث باستخدام تحليل الانحدار الخطي المتعدد ومعالجتها باستخدام برنامج SPSS الإصدار 20.

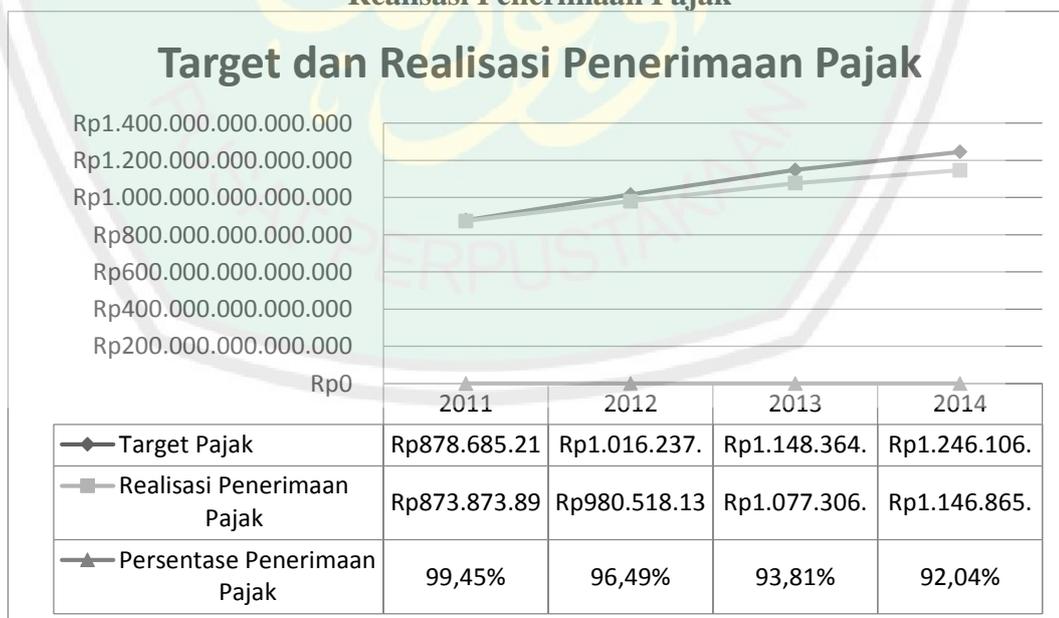
و تدل نتائج هذه الدراسة إلى أن (الأول) نتيجة اختبار الفرضية نموذج الانحدار المتزامن له أثر إيجابي قوي بين المتغيرات المستقلة منها مجلس المفوضين المستقلين، الملكية المؤسسية والملكية الإدارية على المتغير التابع، وهي التهرب الضريبي. (الثاني) نتيجة الاختبار الجزئي بين مجلس المفوضين المستقلين والملكية الإدارية لها تأثير إيجابي قوي على التهرب الضريبي، مع أن الملكية المؤسسية لها تأثير سلبي قوي على التهرب الضريبي.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) untuk pengeluaran umum. Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar negara, setiap negara selalu berusaha memperoleh pendapatan dari sektor pajak dalam jumlah yang semestinya termasuk Indonesia. Di Indonesia pengeluaran umum maupun pendapatan di realisasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN terdapat komponen-komponen penting, salah satunya adalah penerimaan pajak. Target dan realisasi penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2011-2016 dapat dilihat dalam Gambar 1.1 sebagai berikut:

**Gambar 1.1  
Realisasi Penerimaan Pajak**



Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi dalam hal perpajakan agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan negara (Jupri Siahhan, 2015; dalam I Gusti Ayu dan Ketut Alit, 2014). Salah satu pihak yang memberikan kontribusi pajak terbesar di negara adalah perusahaan. Apabila dalam kegiatan operasionalnya perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar maka perusahaan harus mengeluarkan pajak yang besar ke negara sebanding dengan pendapatan yang mereka terima. Namun sebagian besar wajib pajak yang dalam hal ini adalah perusahaan, memandang pajak dari sisi yang berbeda. Perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang merugikan perusahaan karena sifatnya yang mengurangi laba perusahaan yang mana berlawanan dengan prinsip perusahaan yang ingin mendapatkan laba yang sebesar-besarnya (Silaen, 2016). Beban pajak yang tinggi mendorong banyak perusahaan melakukan berbagai upaya agar pajak yang dikeluarkan lebih sedikit salah satunya dengan melakukan manajemen pajak (Santoso, 2014).

Penghindaran pajak merupakan salah satu bagian dari manajemen pajak yang mana merupakan usaha secara legal untuk mengurangi pajak terutang. Dikatakan legal karena perusahaan memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan, serta memanfaatkan celah yang belum diatur dalam peraturan perpajakan (Silaen, 2016). Tidak maksimalnya pembangunan daerah, pembangunan infrastruktur serta peningkatan kesejahteraan dikarenakan penerimaan pajak semakin berkurang tidak sesuai dengan target realisasi penerimaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat melakukan penuntutan secara hukum, karena

pelaku penghindaran pajak memanfaatkan celah-celah dan hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang perpajakan meskipun tindakan ini merugikan negara. Dalam penelitian ini penghindaran pajak diukur dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*.

Fenomena kasus penghindaran pajak di Indonesia seperti, produsen fesyen terkenal, Gucci saat ini tengah menjadi sorotan karena diduga melakukan penghindaran pajak. Polisi pajak Italia dalam beberapa hari belakangan ini mendatangi kantor pusat Gucci yang baru di Milan dan sejumlah kantor Gucci lainnya untuk mencari bukti-bukti pelanggaran. Jaksa penuntut umum Milan menuduh Gucci melakukan penghindaran pajak hingga miliaran dolar. Dilansir, *AFP*, Selasa (5/12/2017), koran lokal *La Stampa* menyebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum menuduh Gucci menghindari pajak karena Gucci mendeklarasikan penjualan produk di Italia, dialihkan di Swiss yang notabene negara dengan pajak yang lebih menguntungkan. Padahal seharusnya, Gucci mendeklarasikan penjualan di Italia. Atas hal itu, Gucci menghemat 1,3 euro setara US\$ 1,5 miliar atau Rp 22,5 triliun dalam pajak domestik. Investasi ini dilaporkan berdasarkan laporan dari mantan pekerja senior Gucci yang sudah meninggalkan perusahaan ini. *La Stampa* mengatakan, polisi pajak selama 3 hari di kantor Gucci di Milan dan kantor-kantor lainnya. Berkaitan dengan hal ini, pihak Gucci angkat suara. “Sehubungan dengan sebuah artikel mengenai audit oleh polisi pajak setempat yang dilakukan di kantor Gucci’s di Florence dan Milan yang diterbitkan di surat kabar Italia hari ini, Gucci menegaskan bahwa mereka memberikan kerja sama penuh dengan otoritas masing-

masing dan yakin akan kebenarannya dan transparansi operasinya,” kata Guuci dalam pernyataannya (Suhendra, detik finance ).

Berdasarkan hasil uraian fenomena yang telah terjadi diatas, menunjukkan bahwa di Indonesia masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak salah satunya adalah sistem perpajakan. Sistem perpajakan di Indonesia sekarang menggunakan *Self Assessment System*, yang mana pemerintah memberikan kepercayaan kepada para wajib pajak dalam menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, wajib pajak melakukan kewajiban pajak mulai dari menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajak yang harus dibayar. Dengan demikian memberikan peluang yang cukup besar bagi sebagian perusahaan melakukan penghindaran pajak. Perlunya pembentukan tata kelola perusahaan yang baik digunakan untuk mengawasi terhadap tindakan manajemen perusahaan.

Beberapa penelitian sebelumnya melakukan penelitian mengenai pengaruh *Good Corporate governance* terhadap penghindaran pajak diantaranya sebagai berikut. Penelitian kosyi Hadi Prayogo (2016) menyatakan bahwa kepemilikan saham berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan dewan komsaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Begitu pula hasil penelitian yang dilakukan oleh Deddy Dyas Cahyono, dkk (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak, sedangkan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian selanjutnya Yoli Oktafiani Sari (2016) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris

independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Citra Ayuning Sari Yuono (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu yang mengemukakan hasil berbeda, maka peneliti tertarik untuk menguji kembali dengan menggabungkan *good corporate governance* yang diproksikan dengan dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Pembentukan *Good Corporate Governance* merupakan upaya untuk mengawasi kinerja perusahaan agar usaha-usaha yang dilakukan tidak melanggar undang-undang. *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh penting mengenai kebijakan pajak perusahaan, karena manajemen pajak dapat menjadi kompleks serta adanya kesempatan untuk bersikap oportunistik dalam pengelolaannya, serta memastikan agar tata kelola perusahaan dalam hal perpajakan tetap dalam koridor penghindaran pajak yang bersifat legal bukan penghindaran pajak yang bersifat ilegal Elsiانا Ruddian (2017).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah, periode tahun yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2014-2015, variabel *good corporate governance* diproksikan menggunakan 3 proksi yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris independen. Sedangkan untuk pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan CETR. Objek dalam penelitian ini merupakan perusahaan yang terdaftar di LQ45, LQ45 merupakan salah satu indeks di Bursa Efek Indonesia

(BEI), dimana indeks tersebut diperoleh dari perhitungan 45 emiten dengan seleksi kriteria seperti penilaian atas likuiditas.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul penelitian sebagai berikut “**Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di LQ45.**”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Good Corporate Governance* (dewan komisaris independen) berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?
2. Apakah *Good Corporate Governance* (kepemilikan institusional) berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?
3. Apakah *Good Corporate Governance* (kepemilikan manajerial) berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris terhadap:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* (dewan komisaris independen) terhadap penghindaran pajak perusahaan
2. Untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* (kepemilikan institusional) terhadap penghindaran pajak perusahaan

3. Untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* (kepemilikan manajerial) terhadap penghindaran pajak perusahaan

### 1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas sebagai bahan referensi dan masukan pada pihak-pihak yang melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah perpajakan khususnya mengenai penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan diharapkan penelitian ini menjadi tambahan pertimbangan pihak manajemen pajak dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku.
- b. Bagi regulator, penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan terhadap regulator dalam membuat peraturan atau kebijakan-kebijakan perpajakan sehingga potensi penerimaan negara dari sektor pajak dapat dimaksimalkan.
- c. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi dan bahan pengembangan peneliti selanjutnya terkait pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap penghindaran pajak dalam perusahaan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan penelitian ini, digunakan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Hasil-hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Kosyi Hadi Prayogo (2015)	Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2014)	Kuantitatif	Hasil menunjukkan bahwa latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit dan kepemilikan saham terbesar sesuai dengan hipotesis yang diajukan dimana berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan kompensasi eksekutif, dewan komisaris independen, kepemilikan saham publik dan kepemilikan saham eksekutif tidak memiliki hasil yang sesuai dengan hipotesis yang diajukan yaitu tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2	Deddy Dyas Cahyono., dkk (2016)	Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (SIZE), Leverage (DER) dan Profitabilitas (ROA)	Kuantitatif	hasil penelitian sebagai berikut: dari uji keenam variabel independen, variabel dengan pengaruh signifikan pada penghindaran pajak adalah kepemilikan institusional.

**Tabel 2.1 (Lanjutan)**  
**Hasil-hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode Tahun 2011-2013.		Dan lima variabel yang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak adalah komite audit, dewan komisaris independe, ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas.
3	Dianing Ratna Wijayani (2016)	Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, <i>Corporate Governance</i> dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia.	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Komisaris independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.
4	Agung Wibawa., dkk (2016)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Terdaftar di Indeks Bursa SRI KEHATI Tahun 2010-2014)	Kuantitatif	Hasil penelitian diketahui secara simultan variabel persentase dewan komisaris independen, komite audit perusahaan, dan kualitas auditor eksternal berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan secara parsial didapatkan persentase dewan komisaris independen dan komite audit perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan kualitas auditor

**Tabel 2.1 (Lanjutan)**  
**Hasil-hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				eksternal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.
5	Yoli Oktafiani Sari (2016)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	Kuantitatif	hasil analisis menemukan bahwa kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kualitas audit secara statistik mempunyai hubungan dengan penghindaran pajak dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
6	Juoro Larastomo dkk (2016)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia.	Kuantitatif	Hasil pengujian analisis regresi berganda menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, komisaris independen dan penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba dan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

**Tabel 2.1 (Lanjutan)**  
**Hasil-hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
7	Nindy, Meiza Utari (2016)	Pengaruh Corporate Governance Terhadap Upaya Penghindaran Pajak Perusahaan.	Kuantitatif	Hasil analisis menunjukkan bahwa komisaris independen dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan kompensasi eksekutif dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara, secara bersamaan kompensasi eksekutif, komisars independen, komite audit dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
8	Venny Maulidah Perdani (2016)	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2014.	Kuantitatif	Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial Dewan Direksi, komite audit, Kepemilikan Institusional dan kapemilikan manajerial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI, akan tetapi dewan komisaris berpengaruh negative dan signifikan.

**Tabel 2.1 (Lanjutan)**  
**Hasil-hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
9	Citra Ayuning Sari Yuono (2016)	Pengaruh Perencanaan Pajak dan Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan.	Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perencanaan pajak dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan kepemilikan manajeriala, kepemilikan institusional, dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
10	Tati Yulia Okrayanti dkk (2017)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur di BEI).	Kuantitatif	Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa leverage, intensitas modal, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance. Sedangkan hasil penelitian secara simultan menunjukkan ukuran perusahaan leverage, intensitas modal, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan insitusional dan komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance.

**Tabel 2.1 (Lanjutan)**  
**Hasil-hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
11	Hidayana (2017)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015.	Kuantitatif	Hasil menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif dan latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
12	Elsiana Ruddin (2017)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2015.	Kuantitatif	Hasil pengujian menyatakan bahwa dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
13	Natrion (2017)	Pengaruh Corporate Governance terhadap manajemen Pajak.	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris, presentase komisaris independen, dan kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Sumber: diolah oleh peneliti

**Tabel 2.2**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No	Nama	Judul	Persamaan dengan Peneliti	Perbedaan dengan Peneliti
1	Kosyi hadi Prayogo (2015)	Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2014)	Menggunakan dewan komisaris independen sebagai variabel independen. Penghindaran pajak sebagai variabel dependen	Variabel independen diproksikan dengan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Penghindaran pajak diukur menggunakan CETR. Objek dan tahun penelitian.
2	Deddy Dyas Cahyono dkk (2016)	Pengaruh Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan komisaris, Ukuran Perusahaan (SIZE), Leverage (DER) dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak ( <i>Tax Aoidance</i> ) pada Perusahaan perbankan yang Listing BEI Periode Tahun 2011-2013	Kepemilikan institusional, dewan komisaris sebagai variabel independen. Penghindaran pajak sebagai variabel dependen	Kepemilikan manajerial sebagai variabel independen. Objek dan tahun pengamatan.
3	Dianing Ratna Wijayani (2016)	Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, <i>Corporate Governance</i> dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia	GCG diproksikan dengan kepemilikan institusional dan komisaris independen.	Kepemilikan manajerial sebagai variabel independen. Objek dan tahun pengamatan.

**Tabel 2.2 (Lanjutan)**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No	Nama	Judul	Persamaan dengan Peneliti	Perbedaan dengan Peneliti
4	Agung Wibawa., dkk (2016)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Terdaftar di Indeks Bursa SRI KEHATI Tahun 2010-2014)	GCG diproksikan dengan komisaris independen	GCG diproksikan dengan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Penghindaran pajak menggunakan rumus CETR. Objek dan tahun pengamatan.
5	Yoli Oktafiani Sari (2016)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	Kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen sebagai variabel independen	Kepemilikan manajerial sebagai variabel independen. Objek dan tahun pengamatan
6	Juoro Larastomo dkk (2016)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran pajak Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia	Kepemilikan manajerial dan dewan komisaris independen sebagai variabel dependen.	Penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Objek dan tahun pengamatan. Kepemilikan institusional sebagai variabel independen. Penghindaran pajak menggunakan rumus CETR.

**Tabel 2.2 (Lanjutan)**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No	Nama	Judul	Persamaan dengan Peneliti	Perbedaan dengan Peneliti
7	Nindy Meiz Utari (2016)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Upaya Penghindaran Pajak Perusahaan.	GCG diproksikan dengan kepemilikan manajerial dan dewan komisaris.	GCG diproksikan dengan kepemilikan institusional. Objek dan tahun penelitian
8	Venny Maulidah Perdani (2016)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2014	GCG diproksikan dengan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial	GCG diproksikan dengan dewan komisaris independen. Penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Objek dan tahun pengamatan.
9	Citra Ayuning Sari Yuono (2016)	Pengaruh Perencanaan Pajak dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Nilai Perusahaan	GCG diproksikan dengan dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial.	Penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Objek dan tahun pengamatan. Penghindaran pajak menggunakan rumus CETR.

**Tabel 2.2 (Lanjutan)**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No	Nama	Judul	Persamaan dengan Peneliti	Perbedaan dengan Peneliti
10	Tati Yulia Okrayanti, dkk (2017)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi pada Perusahaan Manufaktur di BEI)	GCG diproksikan dengan komisaris independen dan kepemilikan institusional. <i>Tax Avoidance</i> sebagai variabel dependen	GCG diproksikan dengan Kepemilikan institusional. Penghindaran pajak menggunakan rumus CETR. Objek dan tahun penelitian.
11	Hidayana (2017)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015	GCG diproksikan dengan komisaris independen	GCG diproksikan dengan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Penghindaran pajak menggunakan rumus CETR
12	Elsiana Ruddin (2017)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015	GCG diproksikan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen	Objek dan tahun pengamatan

**Tabel 2.2 (Lanjutan)**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No	Nama	Judul	Persamaan dengan Peneliti	Perbedaan dengan Peneliti
13	Natrion (2017)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap manajemen pajak	GCG diprosikan dengan dewan komisaris independen.	GCG diprosikan dengan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Penghidaran pajak sebagai variabel dependen, objek dan tahun penelitian

Sumber: data diolah oleh peneliti

## 2.2. Kajian Teoritis

### 2.2.1 *Good Corporate Governance*

#### 2.2.1.1. Pengertian *Good Corporate Governance*

*Good Corporate Governance* merupakan topik utama yang banyak diperbincangkan khalayak ramai dalam beberapa tahun ini. Secara umum kemampuan suatu negara untuk menarik modal asing sangat tergantung pada sistem *Good Corporate Governance* yang mereka anut dan sampai tingkat mana manajemen suatu perusahaan menghormati dan mematuhi hak-hak hukum para pemegang saham. Para investor pun tidak bersedia menanamkan modalnya pada perusahaan di suatu negara yang tidak memiliki sistem *Good Corporate Governance* yang efektif.

Secara teoritis konsep *Good Corporate Governance* bukan suatu hal yang baru bagi manajemen korporasi, tetapi di Indonesia konsep ini menjadi fenomena baru dalam tata kelola korporasi semenjak pasca krisis tahun 1997. Awalnya konsep *Good Corporate Governance* di Indonesia diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) dalam rangka *economy recovery* pasca krisis, *Good Corporate Governance* merupakan suatu konsep tentang tata cara kelola perusahaan yang sehat dan diharapkan dapat melindungi pemegang saham (*stakeholders*) dan kreditur agar dapat memperoleh kembali investasinya.

Struktur *good corporate governance* pada suatu korporasi dipengaruhi oleh berbagai faktor terutama teori korporasi yang dianut, budaya, dan sistem hukum yang berlaku pada satu negara dengan negara lainnya berbeda-beda. Walaupun berbeda, tetapi dari semua istilah *good corporate governance* tersebut memiliki inti pengertian yang sama.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2014), *Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan *intern* dan *ekstern* lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Menurut Sutan Remy Sjahdeni, *Corporate Governance* adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggungjawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan dan mekanisme yang harus ditempuh

oleh masing-masing unsur yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari struktur perseroan tersebut.

Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Lembaga *Corporate Governance* di Malaysia, yaitu *Finance Committee on Corporate Governance* (FCCG), mendefinisikan *corporate governance* sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan.

*Good Corporate Governancae* merupakan sistem pengendalian dan peraturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan, maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri. Definisi *Good Corporate Governance* yang umum digunakan adalah *Good Corporate Governanse* sebagai sistem hukum dan praktik untuk menjalankan kewenangan dan kontrol dalam kegiatan bisnis perusahaan. Salah satu komponen utama di *Good Corporate Governance* adalah manusia yang dikelompokkan ke dalam beberapa jabatan/fungsi/organ.

Terdapat lima kelompok organ dengan fungsinya masing-masing di *Good Corporate Governance*, yaitu BoD yang berfungsi *oversight*, CEO yang berfungsi *enforcement*, BoC yang berfungsi memonitoring. Setiap pihak dalam fungsinya

masing-masing saling berinteraksi untuk mencapai tujuan *Good Corporate Governance*. Mekanisme *Good Corporate Governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial.

Menurut OECD (*organisation for economic co-operation and defelopment*) *Good Corporate Governance* sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board dan pemegang saham serta pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Tujuan penerapan *good corporate governance* menurut OECD adalah:

1. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan penerapan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, dan kewajaran dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan;
2. Terlaksananya tanggungjawab sosial perusahaan terhadap stakeholders;
3. Terlaksananya pengelolaan perusahaan secara profesional dan mandiri;
4. Meningkatkan iklim investasi nasional yang kondusif;
5. Terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh organ perusahaan yang didasarkan pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tuntutan atas adanya penerapan *Good Corporate Governance* juga merupakan salah satu isu menarik minat masuknya pemodal asing ke dalam pasar modal suatu negara. Sehingga semakin baik suatu negara menerapkan prinsi-prinsip yang ada dalam *Good Corporate Governance* menjadi indikasi adanya perlakuan yang baik terhadap pemodal.

### 2.2.1.2. Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip merupakan salah satu pilar utama dalam pengembangan *Good Corporate Governnace* (Rezaee, 2017). Prinsip-prinsip dasar ini berperan sebagai pijakan bagi perusahaan dalam memilih dan menetapkan aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip yang baik maka berbagai aktivitas dapat bersinergi untuk mencapai tujuan *Good Corporate Governance*, yaitu memberikan nilai tambah bagi perusahaan sebagai entitas ekonomi sekaligus entitas sosial.

Prinsip-prinsip *good corporate governance* berdasarkan keputusan menteri (KEPEMEN) Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada BUMN meliputi:

1. *Transparancy* (Transparan), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi meteril dan relevan mengenai perusahaan;

Transparansi dalam hal ini berhubungan dengan kualitas informasi yang disampaikan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, tepat waktu, serta dapat dibandingkan dengan indikator-indikator lain yang sama karena memudahkan untuk menilai kinerja dan risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Dalam praktik transparansi, perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan transaksi-transaksi penting yang berhubungan dengan perusahaan, risiko-risiko yang dihadapi serta planning atau kebijakan apa yang akan dijalankan oleh perusahaan.

2. *Independency* (Kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat;
3. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;

Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah keagenan yang toleh komisaris timbul antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya.

4. *Responsibility* (Pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat;
5. *Fairness* (Kewajaran dan Kesetaraan), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Kewajaran mencakup adanya sistem hukum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan pemegang saham.

#### **2.2.1.3. Manfaat *Good Corporate Governance***

Dengan melaksanakan *good corporate governance*, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh antara lain (Hidayana, 2017):

1. Menambah kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya

2. Pemegang saham puas dengan kinerja perusahaan karena akan meningkatkan shareholder value dan deviden
3. Proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan kinerja perusahaan, efisiensi operasional perusahaan, dan pelayanan kepada stakeholder yang meningkat.
4. Membantu pengelolaan perusahaan agar lebih taat pada ketentuan, peraturan dan hukum.

Menurut (Hidayana, (2017); dalam Zarkasyi (2008), ada lima manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* yaitu:

1. Membantu perusahaan dan perekonomian nasional, dalam hal ini menarik investor dengan nilai lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditur domestik maupun internasional.
2. Mengurangi korupsi
3. Membangun manajemen dan *corporate board* dalam pemantauan penggunaan aset perusahaan
4. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.
5. Secara tidak langsung akan mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.

#### 2.2.1.4. Mekanisme *Good Corporate Governance*

Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan control, pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme *corporate governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi ( Yuono, 2016; dalam Arifin, 2005). Mekanisme *good corporate governance* dalam penelitian ini adalah dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial.

##### A. Dewan Komisaris Independen

Menurut Winata (2014) komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dalam pemegang saham terkendali. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait.

Semakin tinggi prosentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan *tax avoidance* dapat semakin rendah.

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004, komisaris independen adalah anggota komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai hubungan afiliasi dan tidak mempunyai hubungan usaha langsung maupun tidak langsung dengan emiten atau perusahaan publik (Yunono, 2016).

Fahriani (2016) komisaris independen melakukan pengawasan yang sangat baik dengan mengarahkan perusahaan berdasarkan pada aturan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen agar tidak terjadi asimetri informasi yang terjadi antara manajemen perusahaan dengan para *stakeholder*.

### **B. Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak (Winata, 2014).

Kepemilikan institusional merupakan proporsi pemegang saham yang dimiliki oleh pemilik institusional seperti perusahaan asuransi, bank dan perusahaan investasi dan kepemilikan lain kecuali anak perusahaan dan institusi lain yang memiliki hubungan istimewa (perusahaan afiliasi dan perusahaan asosiasi) (Yuono, 2016).

### **C. Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan antara

pemegang saham luar dengan manajemen, sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah seorang pemilik juga (Yuono, 2016).

Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham oleh pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan, yaitu direksi dan komisaris (Perdani, 2016; dalam Pujiati dan Widanar, 2009). Adanya kepemilikan manajerial biasanya akan menimbulkan masalah diantara pengelola dengan perusahaan yang mempunyai tujuan masing-masing. Salah satu masalah yang biasanya ditimbulkan karena adanya kepemilikan manajerial adalah masalah agensi, dimana antara pemilik saham dan perusahaan mempunyai fungsi dan tujuan yang berbeda. Dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya merupakan tujuan utama perusahaan dan pemilik saham (Perdani, 2016; dalam Prasetyantoko, 2008; 59).

Kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan-kepentingan manajer dengan pemegang saham. Sehingga permasalahan keagenan dapat diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer dianggap sebagai seorang pemilik (Ruddian, 2017; dalam Herawati, 2008).

#### **2.2.1.5. Kajian Islam *Good Corporate Governance***

Jauh sebelum adanya istilah *Good Corporate Governance*, Islam sudah menerapkan tata kelola yang sesuai dengan syariat islam yang biasa disebut dengan *Islamic Corporate Governance* yang menggabungkan unsur tauhid, aturan syariah, dan memelihara tujuan pribadi tanpa mengabaikan tugas sosial kesejahteraan.

Prinsip *Good Corporate Governance* yang sekarang diterapkan ternyata selaras dengan ajaran agama islam. Islam selalu memperkenalkan etika yang baik, kejujuran, moral, serta integritas.

Dalam islam kegiatan sehari-hari seseorang dan transaksi perusahaan harus didasarkan pada nilai-nilai kejujuran, ketegasan, rasa hormat, keadilan, toleransi, kesabaran, dan bukan kebohongan. Umar M. Chapra dalam *Islamic and Economic Challenge* (2002) menyatakan bahwa dalam sistem ekonomi islam yang telah diterapkan pada beberapa negara muslim antara lain menggunakan prinsip syariah yang lebih menekankan pada aspek harmoni. Prinsip syariah yang erat hubungannya dengan *Good Corporate Governance*, karena lebih menekankan pada bagi hasil yang berarti lebih menonjolkan aspek *win-win solution*, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam berbisnis.

*Good Corporate Governance* dalam islam harus mengacu pada prinsip-prinsip dibawah ini (Nofianti, 2014):

1. Tauhid

Tauhid merupakan prinsip dasar tertinggi dari semua kegiatan hidup umat islam, dan menjadi pegangan setiap muslim tanpa membedakan madzhab ataupun aliran yang dianutnya. Tauhid adalah prinsip tentang ke-Esa-an tuhan yang mengajarkan kepada manusia bahwa Tuhan adalah satu atau Maha Tunggal. Prinsip Tauhid mengajarkan kepada manusia untuk senantiasa mengingat bahwa dirinya hanyalah makhluk allah yang harus taat kepadanya dan melaksanakan segala perintah serta meninggalkan larangan-Nya. Sebagaimana Firman Allah dalam surat Az Zumar ayat 38:

وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۗ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۗ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۗ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

*“Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: “Siapakah yang menciptakan langit dan Bumi?”, niscaya mereka menjawab: Allah”. Katakanlah: “maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmat-Nya?. Katakanlah: “Cukup Allah bagiku”. Kepada-Nya-lah bertawakkal orang-orang yang berserah diri”.*

Hakikatnya tauhid adalah berserah diri kepada Allah. Baik itu ibadah maupun muamalah. Sehingga semua aktivitas yang dilakukan adalah menciptakan pola kehidupan sesuai kehendak Allah. Apabila seseorang ingin melakukan bisnis, ia harus mengetahui dengan baik hukum agama yang mengatur perdagangan agar ia tidak melakukan aktivitas yang haram dan merugikan masyarakat (Mardani, 2012).

## 2. Shiddiq (kejujuran)

Benar dalam perkataannya dan perbuatannya. Dalam islam sangat dianjurkan untuk berkata dan berbuat jujur, dalam melaporkan dan melaksanakan semua hal yang dilakukan di perusahaan. Sebagai mana Firman Allah Surat An-Najm ayat 4-5:

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. (4) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ. (5)

*“Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya) (4). Yang diajarkan kepadanya oleh Ijibril) yang sangat kuat (5)”.*

Ayat diatas menekankan perusahaan bahwa dalam praktiknya, kejujuran harus diterapkan dalam transaksi dan semua hal yang dilakukan

oleh perusahaan. Implikasinya adalah tegaknya kejujuran dan menghindari segala bentuk penipuan, penggelapan, dan perilaku dusta. Orang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka ia akan di catat sebagai orang yang jujur disisi Allah.

3. Amanah (penuh kepercayaan)

Benar-benar bisa dipercaya. Menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Allah dan orang lain. Jika suatu urusan dieserahkan kepadanya, niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Fiman Allah QS. Al-A'raaf ayat 68:

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ

*“Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu”.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa perusahaan harus meyakini semua anggota perusahaan mempunyai kompetensi sesuai dengan fungsi dan tugasnya sehingga menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Menjaga kepercayaan bukan saja kepada pemegang saham dan perusahaan tetapi juga menjaga kepercayaan yang diberikan Allah.

4. Tabligh (menyampaian/transparansi dan keterbukaan)

Menyampaikan tidak ada yang disembunyikan meski menyinggung.

Menyampaikan Risalah dari Allah tentang kebenaran yang harus ditegakkan dimuka bumi. Sebagaimana Firman Allah surah Al-maidah ayat 67:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ

يَعِصْمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

*“Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan-mu. Dan jika kamu tidak mengerjakannya (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan risalah-Nya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam praktiknya, perusahaan harus menyampaikan risalah kebenaran dan diwujudkan dalam bentuk sosialisasi praktik-praktik bisnis yang baik dan bersih, termasuk perilaku bisnis Rasulullah SAW dan para Sahabatnya. Allah Maha Tahu segala sesuatu yang dilakukan oleh hambanya. Bila kita mengerti bahwasannya Allah Maha Tahu maka tidak akan ada yang disembunyikan.

#### 5. Tawazun (keseimbangan)

Keseimbangan dalam segala hal merupakan karakter dari ahlussunnah wal jamaah yang selalu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Sesuai dengan Firman Allah QS. Al-Mulk ayat 3:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۗ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفْوُتٍ ۗ فَإَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ

*“Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?”.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa keseimbangan perusahaan menyatakan prinsip syariah islam dalam pengelolaan harta tidak menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik, tetapi pada semua pihak yang dapat menerapkan adanya suatu kegiatan ekonomi.

### 2.2.2. Teori Stakeholder

Teori stakeholder berkembang secara bertahap sejak tahun 1970-an. Freeman (1984) mengusulkan suatu teori umum dari perusahaan yang memasukkan akuntabilitas perusahaan terhadap berbagai pemangku kepentingan. Dasar dari teori pemangku kepentingan adalah bahwa perusahaan telah menjadi sangat besar, dan menyebabkan masyarakat menjadi sangat *perpassive* sehingga perusahaan perlu melaksanakan akuntabilitasnya terhadap berbagai sektor masyarakat dan bukan hanya kepada pemegang sahamnya saja. Tidak hanya pemangku kepentingan yang dipengaruhi oleh perusahaan, tetapi pemangku kepentingan juga akan mempengaruhi perusahaan. Pemangku kepentingan mencakup antara lain pemegang saham, karyawan, pemasok, pelanggan, kreditur, komunitas lokal, dan masyarakat umum, termasuk lingkungan sosial.

Deegan (2004) menyatakan bahwa *stakeholder theory* adalah “Teori yang menyatakan bahwa semua *stakeholder* mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Para stakeholder juga dapat memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan tidak memainkan peran secara langsung dalam suatu perusahaan.” Menurut Wibisono (2007), *stakeholder* diartikan sebagai suatu pihak maupun kelompok yang berkepentingan secara langsung/tidak langsung bisa mempengaruhi atau dipengaruhi atas aktivitas dan eksistensi perusahaan. Menurut Andreas Lako, *stakeholder theory* menyatakan suatu perusahaan dapat sukses atau hidup matinya suatu perusahaan sangat bergantung pada kemampuan suatu perusahaan dalam menyeimbangkan berbagai macam kepentingan dari para pemangku kepentingan

(stakeholders). Keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut (Ghozali & Chariri, 2007).

Hubungan pemangku kepentingan dengan perusahaan dideskripsikan sebagai hubungan pertukaran, yaitu kelompok-kelompok pemangku kepentingan memasok perusahaan dengan kontribusi dan mengharapkan bahwa kepentingan mereka sendiri juga dipenuhi melalui suatu *inducements*. Penciptaan nilai bagi pemangku kepentingan, dengan cara memfokuskan perhatian pada usaha memaksimalkan nilai bagi komunitas lokal, karyawan, dan dampak lingkungan, dapat dipandang sama dengan menciptakan nilai keuangan bagi pemegang saham. Mengabaikan kebutuhan pemangku kepentingan dapat menurunkan kinerja keuangan bahkan menyebabkan kegagalan perusahaan. Suatu perusahaan yang dikelola dengan baik berpeluang besar mempunyai sistem manajemen lingkungan yang baik dan mempunyai kerjasama yang baik dengan para pemangku kepentingan. Sebaliknya, perusahaan yang mempunyai hubungan buruk dengan para pemangku kepentingan pada umumnya mempunyai karakteristik manajemen yang buruk dan mengakibatkan kinerja keuangan buruk pula.

Budimanta, Prasetijo, & Rudito (2008) menyatakan bahwa terdapat dua bentuk dalam pendekatan stakeholder yaitu *old-corporate relation* dan *new-corporate relation*. *Old-corporate relation* menekankan pada bentuk pelaksanaan aktivitas perusahaan secara terpisah, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat kesatuan di antara fungsi dalam sebuah perusahaan ketika melakukan pekerjaannya. Hubungan perusahaan dengan pihak di luar perusahaan juga bersifat jangka pendek

dan hanya sebatas hubungan transaksional saja tanpa ada kerjasama untuk menciptakan kebermanfaatan bersama. Sedangkan, pendekatan *new-corporate relation* menekankan kolaborasi antara perusahaan dengan seluruh stakeholder sehingga perusahaan bukan hanya menempatkan dirinya sebagai bagian yang bekerja secara sendiri dalam sistem sosial masyarakat. Hubungan perusahaan dengan *Stakeholder* di dalam perusahaan dibangun berdasarkan konsep kebermanfaatannya yang membangun kerjasama dalam menciptakan kesinambungan usaha perusahaan, sedangkan hubungan dengan stakeholder di luar perusahaan didasarkan pada hubungan yang bersifat fungsional yang bertumpu pada kemitraan. Perusahaan selain menghimpun kekayaan juga berusaha bersama-sama membangun kualitas kehidupan dengan stakeholder di luar perusahaan.

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa teori pemangku kepentingan (*stakeholder* teori) merupakan teori yang mempertimbangkan kepentingan para pemegang saham yang dapat memenuhi strategi perusahaan. Stakeholder merupakan bagian dari perusahaan yang memiliki pengaruh dalam pemakaian sumber ekonomi yang digunakan dalam aktivitas perusahaan.

### 2.2.3. Pajak

Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat soemitro, SH., (Mardiasmo, 2016). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undnag (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderon Herschel M., & Brock Horace R, (Widyaningsih, 2011) pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerinth dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, (Widyaningsih, 2011) pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur (Mardiasmo, 2016):

1. Iuran rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### 2.2.3.1. Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi-fungsi untuk menunjang tercapainya pembangunan dan kesejahteraan secara merata.

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiamo (2016:4) yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Berdasarkan beberapa fungsi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak sebagai fungsi anggaran yang mana penerimaan pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara karena memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan, oleh karena itu sesuai dengan pengertian pajak bahwa pemungutan pajak dapat dipaksakan kepada seluruh wajib pajak yang sudah diatur

oleh undang-undang. Sedangkan dalam fungsi mengatur, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah, misalnya pengenaan pajak terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup yang konsumtif.

#### **2.2.3.2. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:9) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga sistem, yaitu:

1. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

#### **2.2.3.3. Pajak Penghasilan**

Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. (Mardiasmo: 163)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. (Widyaningsih: 2011)

### **Subjek Pajak dan Wajib Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016: 163) yang menjadi Subjek Pajak adalah:

1. Orang pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
3. Badan, sekumpulan orang/sekumpulan modal yang berdiri & berpenghasilan di Indonesia lebih dari 183 hari.

4. Badan Usaha Tetap (BUT), sekumpulan orang/modal yang berdiri & berpenghasilan dengan mempunyai badan usaha tetap & terdaftar di kementerian kehakiman & HAM.

### **Bukan Subjek Pajak Penghasilan**

Menurut Mardiasmo (2016: 166) yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka.
3. Organisasi internasional
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional

### **Objek Pajak Penghasilan**

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk (Mardiasmo: 2016):

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
  5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
  6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, premi asuransi.
  7. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- Surplus Bank Indonesia.

#### 2.2.4. Penghindaran Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib bagi perorangan atau badan (perusahaan) yang disetorkan kepada negara. Namun demikian, wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil, salah satunya adalah perusahaan yang ada di Indonesia. Perusahaan berkontribusi besar dalam pembayaran pajak penghasilan mereka kepada pemerintah, tetapi sebagian besar perusahaan menganggap pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Apabila keuntungan dari hasil operasional perusahaan besar maka pajak yang akan di keluarkan perusahaan juga besar. Oleh sebab itu, sebageian besar perusahaan akan melakukan penghindaran pajak sebagai upayah agar dapat membayar pajak dengan seefisien mungkin baik yang bersifat legal maupun ilegal. Ada dua macam penghindaran pajak, penghindaran pajak yang bersifat legal disebut *tax avoidance*, sedangkan penghindaran pajak yang bersifat ilegal adalah penggelapan pajak (*tax evasion*). Sistem perpajakan yang ada di indonesia sekarang menganut sistem *self assessment* yang mana kewajiban perpajakan mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporan pajak terutang dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Dengan demikian memberikan

peluang yang cukup besar bagi wajib pajak yang dalam hal ini adalah perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Menurut Mardiasmo (2016) *tax avoidance* merupakan usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Perusahaan biasanya menggunakan *tax avoidance* dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan. Menurut Mardiasmo (2016) *tax evasion* merupakan meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak). Menurut Dyreng (2008) *tax avoidance* merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Biasanya penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan.

Pada dasarnya *tax avoidance* merupakan bagian dari manajemen pajak, dimana penghindaran pajak merupakan usaha mengurangi pajak dengan tetap memperhatikan dan mematuhi peraturan yang ada. Praktik penghindaran pajak didukung dengan berkembangnya teknologi informasi serta semakin terbukanya perekonomian suatu negara memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya salah satunya dengan mengembangkan usahanya hingga ke luar negeri di tengah persaingan perekonomian di dunia yang semakin ketat, perusahaan berusaha mendapatkan keuntungan yang besar dan berupaya untuk melakukan efisiensi pajak.

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak (Hidayana, 2017):

- 1) Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- 2) Memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- 3) Para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin (*Council of Executive Secretaris of Tax Organization, 1991*).

Dalam buku perencanaan pajak, (Hidayana, 2017; dalam Suandy, 2008) memaparkan beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal antara lain:

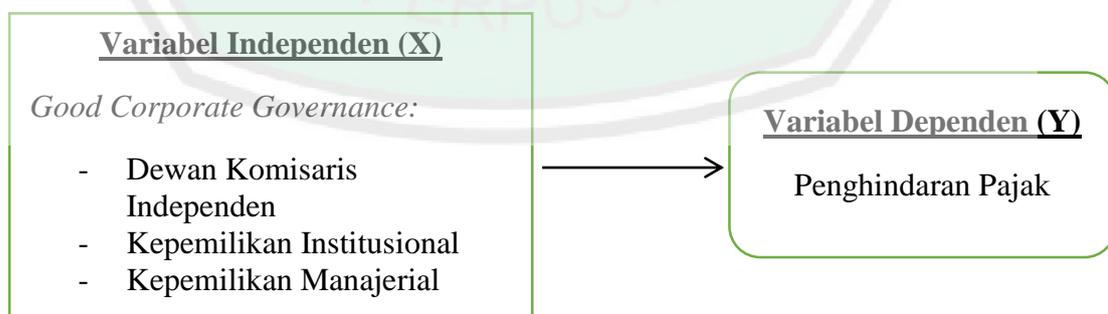
- a. Jumlah pajak yang harus dibayar. Semakin besar pajak yang harus dibayar maka besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
- b. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
- c. Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan untuk melakukan pelanggaran.
- d. Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan wajib pajak melakukan pelanggaran.

Dalam penelitian ini, *penghindaran pajak* diukur dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*, yaitu jumlah pajak penghasilan (PPh) yang dibayar dibagi dengan laba akuntansi sebelum PPh. Nilai CETR yang besar menunjukkan bahwa rendahnya penghindaran pajak pada perusahaan. Sebaliknya nilai CETR yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan melakukan aktivitas penghindaran pajak yang lebih besar. Sebagian besar pengukuran penghindaran pajak berdasarkan data laporan keuangan karena data SPT tidak dipublikasikan kepada masyarakat (Hanlon & Heitzman, 2010). Dalam menghitung CETR, jumlah pajak yang dibayar diambil dari angka pembayaran pajak dalam laporan arus kas, sementara itu, angka laba sebelum pajak diambil dari laporan rugi laba.

### 2.3. Kerangka Konseptual

Untuk melihat bagaimana pengaruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen, maka disusunlah sebuah kerangka pemikiran yang dapat menjelaskan mengenai *good corporate governance* yang mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan.

**Gambar 2.1**  
**Skema Pemikiran**



## 2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis berisi rumusan secara singkat, lugas dan jelas yang dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Dikatakan demikian, agar hipotesis dapat diuji atau dijawab sesuai dengan teknik analisis yang telah ditentukan. Kebenaran hipotesis masih akan diuji lebih lanjut melalui analisis data yang relevan dengan masalah yang terjadi. Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka berfikir yang dipaparkan sebelumnya maka dapat dikembangkan sebagai berikut:

### 2.4.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Semakin tinggi prosentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan *tax avoidance* dapat semakin rendah.

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004, komisaris independen adalah anggota komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai hubungan afiliasi dan tidak mempunyai hubungan usaha langsung maupun tidak langsung dengan emiten atau perusahaan publik (Yunono, 2016).

Teori tersebut didukung dengan hasil penelitian dari Prayogo (2015) dan Cahyono dkk (2016) yang menghasilkan penelitian bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak berbeda dengan penelitian dari Wijayani

(2016) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Wibawa dkk (2016) dan Nindy (2016) hasil penelitiannya menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

**H1:** Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak**

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak (Winata, 2014).

Teori tersebut didukung dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Prayogo (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan saham berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Cahyono dkk (2016) dan Wijayani (2016) dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak. Namun berbeda halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

**H2:** Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak

### 2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham oleh pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan, yaitu direksi dan komisaris (Perdani, 2016; dalam Pujiati dan Widanar, 2009). Adanya kepemilikan manajerial biasanya akan menimbulkan masalah diantara pengelola dengan perusahaan yang mempunyai tujuan masing-masing. Salah satu masalah yang biasanya ditimbulkan karena adanya kepemilikan manajerial adalah masalah agensi, dimana antara pemilik saham dan perusahaan mempunyai fungsi dan tujuan yang berbeda. Dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya merupakan tujuan utama perusahaan dan pemilik saham (Perdani, 2016; dalam Prasetyantoko, 2008; 59). Teori ini didukung dengan hasil penelitian dari Larastomo dkk (2016) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba. Nindy (2016) hasil penelitiannya menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuono (2016) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

**H3:** Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Siregar (2010) penelitian kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan dan menggunakan analisis statistik untuk mengolah datanya. Penelitian ini disusun berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Metode kuantitatif diartikan sebagai metode berlandaskan filsafat positivme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013). Penelitian ini disusun berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang termasuk dalam LQ45 yang memiliki laporan keuangan publikasi pada periode 2014 hingga periode 2016.

#### 3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 selama periode 2014-2016 yang mempublikasikan *annual report*. Periode pengamatan yang dilakukan adalah 3 tahun dari tahun 2014 hingga 2016.

#### 3.3. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian kuantitatif menguraikan sasaran yang akan dijangkau menjadi populasi dan besarnya sampel yang akan mewakili populasi penelitian dengan mendasarkan teknik sampling yang sesuai. Tidak semua penelitian mengharuskan

mengambil sampel dengan teknik tertentu, hal ini dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah sampel. Semakin besar jumlah populasi, maka perlu mengambil sampel untuk mewakili populasi.

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di LQ45 selama periode 2014-2016 yang berjumlah 45 jenis perusahaan.

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan oleh populasi dalam melakukan penelitian. Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin mengambil sampel semua untuk penelitian. Sampel yang diambil oleh peneliti adalah perusahaan yang terdaftar di LQ45 selama periode 3 tahun dari 2014 sampai 2016 yang berjumlah 17 jenis perusahaan.

#### **3.4. Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik untuk menentukan sampel dengan pertimbangan dan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan periode 2014-2016 yang terdaftar di LQ45.

Adapun beberapa kriteria sampel penelitian antara lain:

1. Perusahaan yang terdaftar di LQ45 pada periode 2014-2016 secara berturut-turut.

2. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan untuk periode 2014, 2015, dan 2016.
3. Laporan keuangan tahunan disajikan dengan mata uang Rupiah
4. Perusahaan tidak mengalami kerugian dalam tahun pengamatan agar memudahkan dalam penghitungan penghindaran pajak menggunakan Cash ETR.

**Tabel 3.1**  
**Kriteria Pengambilan Sampel**

Keterangan	Jumlah
Perusahaan yang terdaftar di LQ45 pada periode 2014-2016 secara berturut-turut	45
Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan untuk periode 2014, 2015, dan 2016	(14)
Laporan keuangan tahunan disajikan menggunakan mata uang Rupiah	(3)
Perusahaan tidak mengalami kerugian dalam tahun pengamatan agar memudahkan dalam penghitungan penghindaran pajak menggunakan Cash ETR	(11)
Jumlah perusahaan yang digunakan	17
Total keseluruhan sampel selama 3 tahun ( $17 \times 3 = 51$ )	51

Sumber: Data diolah peneliti

### 3.5. Data dan Jenis Data

Data adalah bentuk-bentuk ungkapan, kata-kata, angka, symbol dan apa saja yang memberikan makna, yang memerlukan proses lebih lanjut. Data harus terukur, baik dengan jenis ukuran atau skala nominal, ordinal, interval, atau rasio. Data dapat berasal dari sumber data primer dan sekunder, yaitu:

- Data primer: data yang diperoleh dari responden melalui kuisisioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan

narasumber. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

- Data sekunder: data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, laporan keuangan dari BEI ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).
- Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data sekunder karena data diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Sumber-sumber dapat diperoleh dari mengunduh di website LQ45: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan periode 2014-2016 pada perusahaan yang terdaftar di *LQ45*.

### **3.6. Definisi Operasional Variabel**

Dalam penelitian kuantitatif, definisi operasional adalah penjelasan operasionalisasi semua variabel yang dimasukkan dalam hipotesis. Definisi operasional menjelaskan karakteristik yang dapat diamati dalam rangka mengukur variabel. Pengukuran variabel adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas, biasanya terhadap satuan pengukuran.

Pengertian variabel penelitian menurut Sugiyono (1999) adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, dan kemudian ditarik kesimpulannya.

#### **3.6.1. Variabel Dependen**

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah Penghindaran Pajak (Y). Ada dua cara yang sering digunakan oleh para peneliti

untuk mengukur penghindaran pajak, yaitu *cash effective tax rate* (CETR), dan *earning management*. Pengukuran yang digunakan terkait dalam penelitian ini adalah *Cash Effective Rate*. Yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin besar CETR mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. CETR dirumuskan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nandasari (2015):

$$\text{CETR} = \frac{\text{pajak yang dibayarkan perusahaan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

### 3.6.2. Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel independennya adalah *Good Corporate Governance* yang di rinci menjadi tiga yaitu, dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial.

#### 3.6.2.1. Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Variabel tersebut diukur berdasarkan presentase jumlah dewan komisaris terhadap total komisaris yang ada dalam jajaran dewan komisaris perusahaan. Dewan komisaris independen dirumuskan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Cahyono (2016) :

$$\text{Dewan komisaris} = \frac{\text{jumlah komisaris independen}}{\text{jumlah dewan komisaris}}$$

komisaris independen dapat diketahui dari keterangan jabatan dalam susunan dewan komisaris yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Pengukuran ini menggunakan persentase karena untuk melihat apakah perusahaan sudah memenuhi syarat yang diberlakukan oleh OJK bahwa 30% dari dewan komisaris merupakan komisaris independen.

### 3.6.2.2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional berarti kepemilikan saham oleh perusahaan lain yang dapat mengendalikan kinerja manajemen yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Besar kecilnya kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak perusahaan. Sejalan dengan pengukuran yang dilakukan dalam penelitian Wijayani (2016), dirumuskan sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{jumlah saham institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

### 3.6.2.3. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial berarti kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola. Pengukuran Kepemilikan Manajerial dalam penelitian ini, sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yuono (2016), dengan rumus sebagai berikut:

$$KM = \frac{\text{jumlah saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

### 3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Sebelum dilakukan Uji Hipotesis maka model regresi diuji terlebih dahulu dengan Uji Asumsi Klasik. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan data terdistribusi normal.

#### 3.7.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk analisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagai mana adanya tanpa ada tujuan membuat kesimpulan untuk generalisasi. Dalam penelitian ini, analisis statistik deskriptif meliputi rata-rata (*mean*), ukuran penyebaran (*standar deviasi*) dan bentuk distribusi nilai minimum dan nilai maksimum data yang penentuannya menggunakan program SPSS. Statistik deskriptif mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami. Statistik deskriptif digunakan untuk mengembangkan profil perusahaan yang menjadi sampel statistik deskriptif berhubungan dengan pengumpulan data peningkatan data, serta penyajian hasil peningkatan tersebut (Ghozali, 2011).

#### 3.7.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah data yang telah dikumpulkan oleh peneliti memiliki kualitas yang baik. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Jika data yang telah dikumpulkan sudah

memenuhi seluruh kriteria asumsi klasik, maka data yang ada termasuk dalam kategori data yang baik.

### **3.7.2.1. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal (Ghozali, 2006). Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Pada penelitian ini terdapat dua acara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak dalam pengujian ini yang digunakan adalah analisis statistik dengan uji kolmogrov-smirnov dan analisis grafik dengan menggunakan uji probability plot.

Uji Kolmogrov-Smirnov digunakan untuk memberikan angka-angka yang lebih detail untuk menguatkan apakah terjadi normalitas atau tidak dari data-data yang digunakan. Normalitas terjadi apabila hasil dari uji kolmogro-smirnov lebih dari 0,05.

Uji Probability Plot digunakan untuk membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

### **3.7.2.2. Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2009). Dengan demikian, saat diantara variabel independen tidak terjadi korelasi maka model regresi dapat dikatakan baik. Deteksi multikolinieritas pada suatu model

dapat dilihat dari jika nilai *variance inflation factor (VIF)* tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai *VIF* yang tinggi (karena  $VIF=1/tolerance$ ). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance*  $\leq 0,10$  atau sama dengan nilai *VIF*  $\geq 10$  (Ghozali, 2009).

### 3.7.2.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan uji asumsi dalam regresi dimana variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Maksudnya bahwa nilai variabel dependen tidak berhubungan dengan nilai variabel itu sendiri, baik nilai periode sebelumnya atau nilai periode sesudahnya. Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan *uji durbin-watson (DW)*, dimana hasil pengujian ditentukan berdasarkan nilai *durbin-watson*.

### 3.7.2.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah adanya ketidak samaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan dengan pengamatan lain (Ghozali, 2009). Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terkait (dependen) dengan

residualnya. Dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. selain menggunakan metode grafik, pengujian asumsi heteroskedastisitas dapat dilakukan juga dengan metode pengujian statistik uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan variabel bebas terhadap nilai absolut residualnya. Apabila nilai sig > 0,05 maka akan terjadi homoskedastisitas dan jika nilai sig. < 0,05 maka akan terjadi heteroskedastisitas.

### 3.7.3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh antar variabel terikat dan variabel bebas. Penelitian menggunakan program SPSS untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian masing-masing hipotesis dilakukan dengan menguji masing-masing koefisien regresi dengan uji t. Pengujian dalam penelitian ini digunakan untuk membuktikan signifikansi perumusan hipotesis yang dibuat.

Persamaan regresi yang dirumuskan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Penghindaran Pajak

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Regresi

X1 = Komisararis Independen

X2 = Kepemilikan Institusional

X3 = Kepemilikan Manajerial

e = error

### 3.7.3.1. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2006).

### 3.7.3.2. Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Untuk menguji signifikansi pengaruh *corporate governance* yang diprosikan untuk dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak digunakan uji F dengan langkah-langkah berikut:

Ho :  $b_1 = b_2 = b_3 = 0$  (ketiga variabel independen secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen)

Ha :  $b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$  (ketiga variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen)

### 3.7.3.3. Uji Model Regresi Secara Parsial (Uji T)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghazali, 2006). Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter ( $b_1$ ) sama dengan nol

$H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = 0$  (ketiga variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya ( $H_a$ ) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol

$H_a : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$  (ketiga variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen).

### 3.7.3.4. Penentuan Variabel yang Paling Dominan

Penentuan variabel independen yang paling berpengaruh terhadap variabel Y, dapat dilakukan dengan membandingkan koefisien regresi (Beta) antara variabel yang satu dengan yang lain. Variabel independen yang paling dominan pengaruhnya terhadap variabel Y adalah variabel yang memiliki koefisien regresi (beta) yang paling besar.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Hasil Penelitian

##### 4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 periode 2014-2016, LQ45 merupakan salah satu indeks di Bursa Efek Indonesia (BEI), dimana indeks tersebut diperoleh dari perhitungan 45 emiten dengan seleksi kriteria seperti penilaian atas likuiditas. Yang dimaksud dengan penilaian atas likuiditas adalah seleksi atas emiten-emiten tersebut juga dengan mempertimbangkan kapitalisasi dari pasar. Indeks LQ45 menggunakan 45 saham yang merupakan saham-saham dengan transaksi terbanyak di BEI. Sejak diluncurkan pada bulan februari 1997 ukuran utama likuiditas transaksi adalah nilai transaksi dipasar leguler. Sesuai dengan perkembangan pasar dan untuk mempertajam kriteria likuiditas, maka sejak *review* bulan januari 2005, jumlah hari perdagangan dan frekuensi transaksi dimasukkan sebagai ukuran likuiditas. Sehingga kriteria suatu emiten untuk dapat dapat masuk ke dalam perhitungan indeks LQ45 adalah dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Saham-saham tersebut harus tercatat di BEI selama minimal 3 bulan.
2. Saham tersebut harus masuk dalam rangkin 60 besar dari total transaksi saham di pasar leguler (yang dilihat adalah rata-rata nilai transaksi selama 12 bulan terakhir)

3. Saham tersebut juga harus masuk ke dalam jajaran teratas dalam peringkat berdasarkan kapitalisasi pasar (yang dilihat adalah rata-rata kapitalisasi pasar selama 12 bulan terakhir).
4. Keadaan keuangan perusahaan dan prospek pertumbuhan dari perusahaan pemilik saham harus baik, begitu juga frekuensi dan jumlah hari perdagangan transaksi di pasar regulernya juga harus baik.

Duduk di jajaran LQ45 merupakan suatu kehormatan bagi seluruh perusahaan, karena itu berarti para pelaku pasar modal sudah mengakui dan percaya bahwa tingkat likuiditas dan kapitalisasi pasar dari perusahaan ini baik. Namun bagi yang sudah berada di dalamnya harus tetap bekerja keras untuk mempertahankannya, karena saham-saham ini akan dipantau setiap 6 bulan sekali dan akan diadakan review yang biasanya berlangsung pada awal bulan februari dan awal bulan agustus. Saham yang masih berada dalam kriteria akan tetap bertahan dalam jajaran LQ45, sedangkan yang sudah tidak memenuhi kriteria akan diganti dengan yang lebih memenuhi syarat. Pemilihan saham-saham LQ45 harus wajar, oleh karena itu BEI mempunyai komite penasihat yang terdiri dari para ahli di BAPEPAM, Universitas, dan Profesional di bidang pasar modal. Tujuan indeks LQ45 adalah sebagai pelengkap IHSG dan khususnya untuk menyediakan sarana yang objektif dan terpercaya bagi analisis keuangan, manajer investasi, investor dan pemerhati pasar modal lainnya. Dalam memonitor pergerakan harga dari saham-saham yang aktif diperdagangkan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan LQ45 sebagai objek penelitian.

Pengamatan pada objek penelitian dilakukan dengan meneliti laporan tahunan. Jumlah populasi sebesar 45 perusahaan dengan periode pengamatan sebanyak 3 tahun (2014-2016). Proses pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Proses Penentuan Sampel**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Perusahaan yang terdaftar di LQ45 pada periode 2014-2016 secara berturut-turut	45
Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan untuk periode 2014, 2015, dan 2016	(14)
Laporan keuangan tahunan disajikan menggunakan mata uang Rupiah	(3)
Perusahaan tidak mengalami kerugian dalam tahun pengamatan agar memudahkan dalam penghitungan penghindaran pajak menggunakan Cash ETR	(11)
Jumlah perusahaan yang digunakan	17
Total keseluruhan sampel selama 3 tahun ( $17 \times 3 = 51$ )	51

Sumber: Data diolah Peneliti

Berdasarkan kriteria sampel di atas dapat dilihat bahwa perusahaan yang terdaftar di LQ45 tahun 2014-2016 ada 45 perusahaan. Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan selama periode pengamatan dan yang mengalami kerugian dalam tahun pengamatan serta laporan keuangan yang tidak disajikan dalam rupiah dikeluarkan dari sampel. Jadi total perusahaan yang dijadikan sampel penelitian sebanyak 17 perusahaan selama tiga tahun dengan total sampel 51.

**Tabel 4.2**  
**perusahaan yang menjadi Sampel Penelitian**

No	Code	Perusahaan
1	ANTM	Aneka Tambang Tbk.
2	BBCA	Bank Central Asia Tbk.
3	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk.
4	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk.
5	GGRM	Gudang Garam Tbk.
6	HSMP	HM Sampoerna Tbk.
7	ICBP	Indofood CBP Sukses makmur Tbk.
8	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.
9	KLBF	Kalbe Farma Tbk.
10	LPKR	Lippo Karawaci Tbk.
11	LPPF	Matahari Department Store Tbk.
12	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.
13	PTPP	PP (Persero) Tbk.
14	PWON	Pakuwon Jati Tbk.
15	SILO	Siloam International Hospitals
16	UNTR	United Tractors Tbk.
17	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.

Sumber: Data diolah peneliti

#### 4.1.2. Hasil Analisis Deskriptif

**Tabel 4.3**  
**Hasil Statistik Deskriptif**

Variabel penelitian	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviasi
Penghindaran Pajak (Y)	51	-0,4347	0,0280	-0,2412	0,0927
Dewan Komisaris Independen (X1)	51	0,2000	2,0000	0,8958	0,5194

Kepemilikan Institusional (X2)	51	0,0826	1,5445	0,5458	0,2757
Kepemilikan Manajerial (X3)	51	0,0000	0,0009	0,0002	0,0002

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Pada tabel di atas, disajikan deskriptif statistik variabel penelitian meliputi nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (mean) dan standart deviasi. Pada variabel Penghindaran Pajak (Y) diperoleh rata-rata sebesar -0,2412 dengan standart deviasi sebesar 0,0927. Nilai variabel ini berkisar antara -0,4347 hingga -0,0280. Pada variabel Dewan Komisaris Independen (X1) diperoleh rata-rata sebesar 0,8959 dengan standart deviasi sebesar 0,5194. Nilai variabel ini berkisar antara 0,2 hingga 2. Pada variabel Kepemilikan Institusional (X2), diperoleh rata-rata sebesar 0,5458 dengan standart deviasi 0,2757. Nilai variabel ini berkisar antara 0,0826 hingga 1,5445. Rata-rata variabel Kepemilikan Manajerial (X3) sebesar 0,0002 dengan standart deviasi sebesar 0,0002. Nilai variabel ini berkisar antara 0 hingga 0,0009.

#### 4.1.3. Hasil Uji Asumsi Klasik

##### 4.1.3.1. Uji Normalitas

###### a. Uji Normalitas Variabel Dependen dan Independen

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen memiliki distribusi normal. Metode yang digunakan untuk menguji normalitas residual regresi menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. apabila nilai signifikansi hasil uji lebih besar dari 0,05 maka variabel dependen berdistribusi normal. Hasil pengujian disajikan sebagai berikut :

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Asumsi Normalitas Variabel Dependen dan Independen**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Penghindaran Pajak	Dewan Komisaris Independen	Kepemilikan Institusional	Kepemilikan Manajerial
N		51	51	51	51
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	-,2411552	,8957983	,5458315	,0002138
	Std. Deviation	,09269991	,51936504	,27571677	,00023030
Most Extreme Differences	Absolute	,159	,166	,116	,177
	Positive	,159	,166	,116	,167
	Negative	-,154	-,090	-,051	-,177
Kolmogorov-Smirnov Z		1,138	1,183	,825	1,261
Asymp. Sig. (2-tailed)		,150	,122	,504	,083

a. Test distribution is Normal.

a. Calculated from data.

Sumber: Data diolah dengan SPSS

**Lanjutan Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Asumsi Normalitas Variabel Dependen dan Independen**

Variabel penelitian	Kolmogorov-Smirnov Z	Nilai sig.	Keterangan
Penghindaran Pajak (Y)	1,138	0,150	Berdistribusi Normal
Dewan Komisaris Independen (X1)	1,183	0,122	Berdistribusi Normal
Kepemilikan Institusional (X2)	0,825	0,504	Berdistribusi Normal
Kepemilikan Manajerial (X3)	1,261	0,083	Berdistribusi Normal

Sumber: Data diolah peneliti

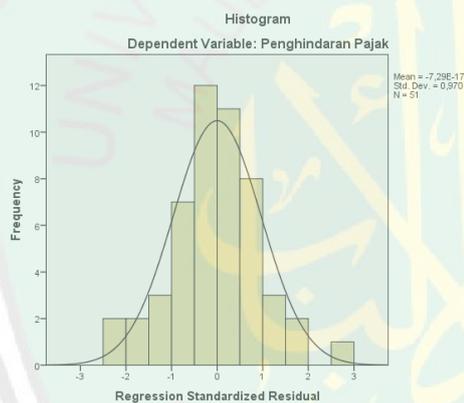
Berdasarkan hasil pengujian normalitas pada tabel di atas diketahui bahwa nilai signifikansi hasil analisis lebih besar dari taraf nyata 5% sehingga dapat dikatakan bahwa variabel dependen dan independen berdistribusi normal.

#### **b. Uji Normalitas Residual Regresi**

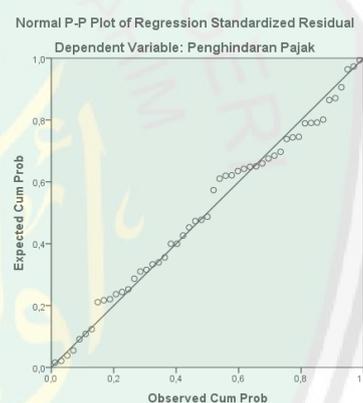
Uji normalitas residual regresi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi

normal. Metode yang digunakan untuk menguji normalitas residual regresi menggunakan grafik histogram dan normal P-P plot, serta uji Kolmogorov-Smirnov. Residual model dikatakan mengikuti distribusi normal apabila data pada grafik histogram mengikuti garis normal dan sebaran data pada grafik normal p-p plot terletak garis diagonal. Sedangkan dari uji Kolmogorov-Smirnov, bila nilai signifikansi hasil uji lebih besar dari 0,05 maka asumsi normalitas terpenuhi. Hasil pengujian disajikan sebagai berikut:

**Gambar 4.1**



**Gambar 4.2**



**Histogram dan Normal P-P Plot**

Sumber: Data diolah dengan SPSS

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Asumsi Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		51
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,07077776
Most Extreme Differences	Absolute	,084
	Positive	,074
	Negative	-,084
Kolmogorov-Smirnov Z		,601
Asymp. Sig. (2-tailed)		,863

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data diolah dengan SPSS

**Lanjutan Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Asumsi Normalitas**

Kolmogorov-Smirnov Z	Nilai sig.	Keterangan
0,601	0,863	Berdistribusi Normal

Sumber : Data diolah pnriliti

Berdasarkan hasil pengujian normalitas pada tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikansi residual regresi yang terbentuk lebih besar dari taraf nyata 5% sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi normalitas tersebut terpenuhi.

#### 4.1.3.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model uji regresi yang baik selayaknya tidak terjadi multikolinieritas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dengan cara menganalisis matriks korelasi variabel-variabel independen yang dapat dilihat melalui *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai VIF yang bisa ditoleransi adalah 10. Apabila nilai VIF < 10 maka disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Asumsi Multikolinieritas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-,225	,028		-8,139	,000		
Dewan Komisaris Independen	,065	,020	,363	3,193	,003	,958	1,044
Kepemilikan Institusional	-,180	,038	-,535	-4,686	,000	,952	1,050

Kepemilikan Manajerial	110,378	46,162	,274	2,391	,021	,943	1,060
------------------------	---------	--------	------	-------	------	------	-------

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Data diolah dengan SPSS

**Lanjutan Tabel 4.6**  
hasil Uji Asumsi Multikolinearitas

Variabel Bebas	Tolerance	VIF	Keterangan
Dewan Komisaris Independen (X1)	0,958	1,044	Tidak terjadi Multikolinearitas
Kepemilikan Institusional (X2)	0,952	1,050	Tidak terjadi Multikolinearitas
Kepemilikan Manajerial (X3)	0,943	1,060	Tidak terjadi Multikolinearitas

Sumber: data diolah peneliti

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui variabel bebas dalam penelitian ini memiliki *Variance Inflation Factor* lebih kecil dari 10, sehingga dapat dikatakan tidak terdapat gejala multikolinieritas antara variabel bebas dalam penelitian ini.

#### 4.1.3.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode  $t$  dengan periode sebelumnya ( $t-1$ ). Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Beberapa uji statistik yang sering dipergunakan adalah Uji Durbin-Watson. Berikut hasil perhitungan DW dengan menggunakan regresi:

**Tabel 4.7**  
**Hasil Pengujian Asumsi Non-Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,646 <sup>a</sup>	,417	,380	,07300169	1,875

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Data diolah dengan SPSS

**Tabel 4.8**  
**Durbin-Watson (DW)**

N	k=3	
	dL	dU
48	1.4064	1.6708
49	1.4136	1.6723
50	1.4206	1.6739
51	1.4273	1.6754
52	1.4339	1.6769
53	1.4402	1.6785

Sumber : Data diolah dari tabel DW

**Lanjutan Tabel 4.7**  
**Hasil Pengujian Asumsi Non-Autokorelasi**

DI	4-dl	Du	4-du	Dw	Interprestasi
1,427	2,573	1,675	2,325	1,875	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Data diolah peneliti

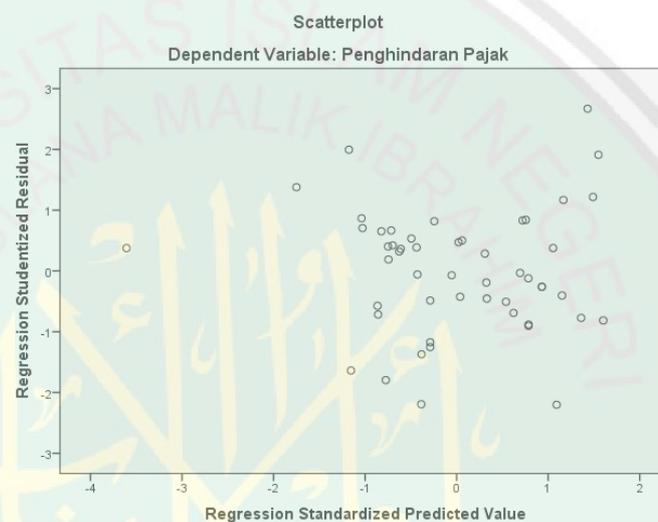
Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel diatas diketahui bahwa nilai Durbin Watson hasil pengujian berada diantara  $du < dw < 4-du$  ( $1,675 < 1,875 < 2,325$ ) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi yang terbentuk.

#### 4.1.3.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu kepengamatan yang lain. Uji pendeteksian heteroskedastisitas dapat pula dilakukan dengan metode grafik yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai presdiksi varibel terikat (dependen) yaitu ZPRED

dengan residual SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah terprediksi, dan sumbu X adalah residual ( $Y$  prediksi –  $Y$  sesungguhnya). Hasil pengujian menggunakan metode grafik adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.3**



**Scatter Plot**

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan grafik scatterplot tersebut terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Selain menggunakan metode grafik, pengujian asumsi heteroskedastisitas dapat dilakukan juga dengan metode pengujian statistik Uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan variabel bebas terhadap nilai absolut residualnya. Apabila nilai  $\text{sig.} > 0,05$  maka akan terjadi homoskedastisitas dan jika nilai  $\text{sig.} < 0,05$

maka akan terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji Glejser dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Glejser**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,041	,016		2,505	,016
Dewan Komisaris Independen	,020	,012	,243	1,682	,099
Kepemilikan Institusional	,003	,023	,016	,114	,910
Kepemilikan Manajerial	-21,132	27,179	-,113	-,777	,441

a. Dependent Variable: absolute.residual

Sumber: Data diolah dengan SPSS

**Lanjutan Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Glejser**

Variabel Bebas	Sig.	Keterangan
Dewan Komisaris Independen (X1)	0,099	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Kepemilikan Institusional (X2)	0,910	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Kepemilikan Manajerial (X3)	0,441	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pada masing-masing variabel diperoleh nilai sig.>0,05 maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Atau dengan kata lain asumsi non-heteroskedastisitas telah terpenuhi.

#### 4.1.3. Hasil Uji Hipotesis

Hasil perhitungan regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi besarnya hubungan antara variabel dependen yaitu Penghindaran Pajak (Y) dengan variabel independen yaitu Dewan Komisaris Independen (X1), Kepemilikan Institusional (X2), dan Kepemilikan Manajerial (X3). Hasil perhitungan yang menggunakan program SPSS tersebut dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-0,225	0,028		-8,139	0,000
1 Dewan Komisaris Independen (X1)	0,065	0,020	0,363	3,193	0,003
Kepemilikan Institusional (X2)	-0,180	0,038	-0,535	-4,686	0,000
Kepemilikan Manajerial (X3)	110,378	46,162	0,274	2,391	0,021

Sumber: Data diolah peneliti

Variabel dependen pada hasil uji regresi berganda adalah Penghindaran Pajak (Y) sedangkan variabel independennya adalah Dewan Komisaris Independen (X1), Kepemilikan Institusional (X2) dan Kepemilikan Manajerial (X3). Model regresi berdasarkan hasil analisis adalah:

$$Y = -0,225 + 0,065 X1 - 0,180 X2 + 1110,378 X3 + e$$

Interpretasi model regresi di atas adalah sebagai berikut:

- $\beta_0 = -0,225$

Kostanta dari persamaan regresi ini menunjukkan nilai sebesar -0,225 artinya ketika tidak terdapat kontribusi variabel Dewan Komisaris Independen (X1), Kepemilikan Institusional (X2) dan Kepemilikan Manajerial (X3) maka Penghindaran Pajak (Y) akan bernilai sebesar -0,225.

- $\beta_1 = 0,065$

Koefisien regresi ini menunjukkan kontribusi yang diberikan variabel Dewan Komisaris Independen (X1) terhadap Penghindaran Pajak (Y). Koefisien variabel Dewan Komisaris Independen (X1) bernilai positif artinya setiap peningkatan variabel Dewan Komisaris Independen (X1) sebesar 1 satuan

maka akan meningkatkan Penghindaran Pajak (Y) sebesar 0,065 dengan asumsi variabel lain konstan.

- $\beta_2 = -0,180$

Koefisien regresi ini menunjukkan kontribusi yang diberikan variabel Kepemilikan Institusional (X2) terhadap Penghindaran Pajak (Y). Koefisien variabel Kepemilikan Institusional (X2) bernilai negatif artinya setiap peningkatan variabel Kepemilikan Institusional (X2) sebesar 1 satuan maka akan menurunkan Penghindaran Pajak (Y) sebesar 0,180 dengan asumsi variabel lain konstan.

- $\beta_3 = 110,378$

Koefisien regresi ini menunjukkan kontribusi yang diberikan variabel Kepemilikan Manajerial (X3) terhadap Penghindaran Pajak (Y). Koefisien variabel Kepemilikan Manajerial (X3) bernilai positif artinya setiap peningkatan variabel Dewan Komisaris Independen (X1) sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan Penghindaran Pajak (Y) sebesar 110,378 dengan asumsi variabel lain konstan.

#### 4.1.4.1. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Penelitian ini menggunakan nilai R Square untuk mengevaluasi model regresi terbaik. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh R Square sebesar 0,417 atau 41,7%, Artinya variabel Penghindaran Pajak (Y) dijelaskan sebesar 41,7% oleh variabel Dewan Komisaris

Independen (X1), Kepemilikan Institusional (X2), Kepemilikan Manajerial (X3). Sedangkan sisanya sebesar 58,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar persamaan regresi atau yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,646 <sup>a</sup>	,417	,380	,07300169

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional

#### 4.1.4.2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji hipotesis simultan dari variabel independen (X) terhadap Variabel dependen (Y). Dalam hipotesis ini, diduga bahwa variabel Dewan Komisaris Independen (X1), Kepemilikan Institusional (X2) dan Kepemilikan Manajerial (X3) secara bersama-sama mempengaruhi Penghindaran Pajak (Y). Variabel independen pembentuk model regresi dikatakan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau signifikan  $< \alpha = 0,05$  Pengujian model regresi secara simultan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Simultan (Uji F)**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	0,179	3	0,060	11,208	0,000
1 Residual	0,250	47	0,005		
Total	0,430	50			

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan hasil perhitungan pada di atas, diperoleh  $F_{hitung}$  sebesar 11,208 (Sig F = 0,000).  $F_{tabel}$  pada taraf nyata 5% dengan derajat independen 3 dan 47 sebesar 2,802. Karena  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $11,208 > 2,802$ ) dan Sig F  $< 5\%$  ( $0,000 < 0,05$ )

maka H1 diterima yang berarti bahwa secara bersama-sama variabel Dewan Komisaris Independen (X1), Kepemilikan Institusional (X2) dan Kepemilikan Manajerial (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Penghindaran Pajak (Y).

#### 4.1.4.3. Uji Model Regresi Secara Parsial (Uji T)

Pengujian model regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen pembentuk model regresi secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Variabel independen pembentuk model regresi dikatakan berpengaruh signifikan jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau signifikan  $< \alpha = 0,05$ . Pengujian model regresi secara parsial adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Parsial (Uji T)**

Variabel independen	$t_{hitung}$	Sig. t	$t_{tabel}$	Keterangan
Dewan Komisaris Independen (X1)	3,193	0,003	2,012	Signifikan
Kepemilikan Institusional (X2)	-4,686	0,000	2,012	Signifikan
Kepemilikan Manajerial (X3)	2,391	0,021	2,012	Signifikan

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Pada pengujian hipotesis variabel Dewan Komisaris Independen (X1) diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 3,193 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003. Nilai statistik uji  $t_{hitung}$  tersebut lebih besar daripada  $t_{tabel}$  ( $3,193 > 2,012$ ) atau nilai signifikansi lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  maka disimpulkan variabel Dewan Komisaris Independen (X1) secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel Penghindaran Pajak (Y).

Pada pengujian hipotesis variabel Kepemilikan Institusional (X2) diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 4,686 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai statistik uji  $t_{hitung}$

tersebut lebih besar daripada  $t_{\text{tabel}}$  ( $4,686 > 2,012$ ) atau nilai signifikansi lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  maka disimpulkan variabel Kepemilikan Institusional (X2) secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel Penghindaran Pajak (Y).

Pada pengujian hipotesis variabel Kepemilikan Manajerial (X3) diperoleh  $t_{\text{hitung}}$  sebesar 2,391 dengan nilai signifikansi sebesar 0,021. Nilai statistik uji  $t_{\text{hitung}}$  tersebut lebih besar daripada  $t_{\text{tabel}}$  ( $2,391 > 2,012$ ) atau nilai signifikansi lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  maka disimpulkan variabel Kepemilikan Manajerial (X3) secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel Penghindaran Pajak (Y).

#### 4.1.4.4. Penentuan Model Yang Paling Dominan

Penentuan variabel independen yang paling berpengaruh terhadap variabel Y, dapat dilakukan dengan membandingkan koefisien regresi (Beta) antara variabel yang satu dengan yang lain. Variabel independen yang paling dominan pengaruhnya terhadap variabel Y adalah variabel yang memiliki koefisien regresi (beta) yang paling besar. Berikut adalah tabel peringkat yang membandingkan koefisien regresi masing-masing variabel independen:

**Tabel 4.14**  
**Ringkasan Hasil Analisis Regresi**

Peringkat	Variabel	Koefisien Beta	Zero-order	R <sup>2</sup>
1	Kepemilikan Institusional (X2)	-0,535	-0,432	23,1%
2	Dewan Komisaris Independen (X1)	0,363	0,335	12,2%
3	Kepemilikan Manajerial (X3)	0,274	0,236	6,5%

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa variabel Kepemilikan Institusional (X2) adalah variabel yang memiliki koefisien beta yang paling besar dengan sumbangan efektif ( $R^2$ ) sebesar 23,1%. Artinya, variabel Y lebih banyak dipengaruhi oleh variabel Kepemilikan Institusional (X2) daripada variabel lainnya. Koefisien beta pada variabel ini bertanda negatif, artinya semakin tinggi Kepemilikan Institusional (X2) maka Penghindaran Pajak (Y) akan semakin menurun dan sebaliknya semakin rendah Kepemilikan Institusional (X2) maka Penghindaran Pajak (Y) akan semakin meningkat.

## **4.2. Pembahasan**

### **4.2.1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak**

Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Dalam penelitian ini dewan komisaris independen diukur dari persentase dewan komisaris independen yaitu jumlah anggota dewan komisaris independen dibagi dengan total dewan komisaris.

Berdasarkan hasil regresi, variabel dewan komisaris independen memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,065 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,003. Jika menggunakan  $\alpha=0,05$ , maka nilai signifikansi dari variabel dewan komisaris independen lebih kecil dari  $\alpha$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen memberikan pengaruh yang signifikan terhadap

penghindaran pajak. Tinggi rendahnya persentasi dewan komisaris independen yang ada memberikan dampak yang berarti terhadap perilaku penghindaran pajak. Semakin banyaknya jumlah komisaris independen maka semakin besarpula pengawasan terhadap kinerja manajemen. Dengan pengawasan yang semakin besar, membuat manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan serta transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga penghindaran pajak dapat diminimalkan. Dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang petingnya manajemen.

Salah satunya, adanya fungsi pengawasan dalam perusahaan terdapat pada ayat-ayat di dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 3:

كَبِيرٌ مَّقْتَبًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

*Artinya: Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan (Qs As-Saff 3).*

Menurut tafsir Quraish Shihab (tafsirq:2018) Allah sungguh sangat benci kalau kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Maksud ayat tersebut memberikan peringatan terhadap orang yang mengabaikan pengawasan terhadap perbuatannya. Islam memperhatikan bentuk pengawasan terutama terhadap diri terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibawa dkk (2016) dewan komisaris independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, menurutnya pengetahuan yang baik terkait dinamika dan kondisi perusahaan amat sangat diperlukan bagi komisaris independen, karena berguna dalam mengidentifikasi jaringan kepentingan

perusahaan yang dapat merugikan. Hal ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dalam menjalankan tanggungjawabnya sudah cukup efektif.

#### **4.2.2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak**

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga, kepemilikan institusional (Yuono, 2016) dalam penelitian ini diukur dengan prosentase dari saham yang dimiliki oleh institusi dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Kepemilikan institusional mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen untuk melakukan manajemen laba.

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negative signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan menunjukkan nilai yang negative dengan nilai  $t_{hitung} = -4,686$ . Dengan adanya kepemilikan institusional mendorong para manajemen untuk meningkatkan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja perusahaan agar dalam menghasilkan laba perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena kepemilikan institusional sebagai pengawas dari luar perusahaan yang memiliki peran penting dalam memonitor perusahaan. Kinerja perusahaan yang meningkat akan memberikan keuntungan bagi pemegang saham karena para pemegang saham akan mendapatkan banyak keuntungan berupa deviden.

Penelitian ini sejalan dengan dengan penelitian Wijayani (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap Tax Avoidance. Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan

terhadap penghindaran pajak terjadi karena kepemilikan institusional diatas 5% tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan insider atau manajerial investor.

#### **4.2.3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Dewan komisaris, direksi memiliki hak untuk menanamkan sahamnya diperusahaan, dengan demikian para manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan karena mereka juga akan menanggung risiko yang diambil oleh perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajerial, para manajemen semakin berusaha memaksimalkan kinerjanya, serta melakukan pengawasan yang lebih ketat. Karena para manajemen memiliki tanggung jawab yang semakin besar untuk memenuhi keinginan para pemegang saham termasuk dirinya.

Kepemilikan manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh para manajemen yang diukur dari persentase saham manajemen. Dengan adanya kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerjanya karena manajemen mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham. Menurut Herawaty (2008) Kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan-kepentingan manajer dengan pemegang saham. Sehingga permasalahan keagenan dapat diasumsikan akan hilang apabila seseorang manajer dianggap sebagai pemilik.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Larastomo dkk (2016) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *earning management*. Kondisi tersebut disebabkan perusahaan sampel yang digunakan dalam penelitian memiliki persentase kepemilikan saham oleh manajerial yang rendah. Menurut Larastomo dkk (Wiyardi, 2013) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial yang relatif kecil belum mampu mengatasi konflik kepentingan antara pemilik dengan manajer sehingga praktik *earning management* belum dapat ditekan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Penelitian ini dilakukan untuk menguji seberapa besar pengaruh *Good Corporate Governance* yang di proporsikan berdasarkan Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda sebagai alat analisis hipotesis. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis model regresi secara simultan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel independen yaitu Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial terhadap variabel dependen yaitu Penghindaran Pajak.
2. Berdasarkan hasil pengujian parsial antara dewan komisaris independen dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh negative dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

#### **5.2. Keterbatasan Penelitian**

Terdapat beberapa keterbatasan yang terdapat didalam penelitian ini yang disebabkan beberapa faktor. Beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya menggunakan tiga proksi pengukuran, yaitu Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional.
2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya dalam rentang waktu 3 tahun yaitu tahun 2014-2016.

### 5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka penulis memberikan beberapa saran bagi peneliti selanjutnya yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah atau menggunakan variabel lain yang memungkinkan memiliki pengaruh besar terhadap penghindaran pajak seperti komite audit, nilai perusahaan, dewan direksi .
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah rentang waktu penelitian dengan mengambil periode pengamatan yang lebih panjang agar dapat memahami lebih dalam tentang penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan alat ukur lain untuk mengukur seberapa agresif suatu perusahaan dalam menghindari pembayaran pajaknya seperti *effective tax rate* (ETR), *current effective tax rate* (CUETR), dan *book-tax difference* (BTD).

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Annisa. (2017). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran perusahaan dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *JOM Fekon*, Vol. 4 No. 1.

Cahyono, Deddy Dyas., Andini, Rita., Raharjo, Kharis. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (SIZE), Leverage (DER) Dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing BEI Periode Tahun 2011-2013. *Journal Of Accounting*, Volume @ No. 2.

Effendi, Muh. Arief. 2009. *The Power Of Good Corporate Governance (Teori dan Implementasi)*. Jakarta: Salemba Empat.

Fahriani, Melinda., Priyadi, Maswar Patuh. 2016. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 5 Nomor 7.

Ghozali, imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi ke Empat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hidayana. 2017. **Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2013-2015**, Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Janie, Dyah Nirmala Arum. 2012. *Statistik Deskriptif & Regresi Linier Berganda dengan SPSS*. Semarang: Semarang University Press.

Khairandy, Ridwan., Malik, Camelia. 2007. *Good Corporate Governance (Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum)*. Yogyakarta: Total Media Yogyakarta.

Larastomo, Juoro., Perdana, Halim Dedy., Triatmoko, Hanung., DKK. 2016. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 63-74.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

- Marfirah, Dina., BZ, Fazli Syam. 2016. Pengaruh Corporate Governance Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI tahun 2011-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol.1 No. 2 Halaman 91-102.
- Natrion. 2017. Pengaruh Corporate Manajemen Terhadap manajemen Pajak. *Prosiding Seminat Nasional Inovasi tehnologi-SNTTek 2017*, ISSN 2580-5495.
- Nandasari, Elna Arlina. 2015. **Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap tax Avoidance**, Artikel Ilmiah. Sekolah Tinggi Ekonomi Perbanas, Surabaya.
- Nindy, Meiza Utari (2016) *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Upaya Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Industri Properti, Real Estate dan Kontruksi Bangunan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)*. Diploma thesis, Universitas Andalas.
- Nofianti, Leni., dan Irfan Andi. 2014. *Hubungan Antara Penerapan Model Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Syariah Dengan Kinerja Lembaga Keuangan Syariah*, SNA. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Okrayanti, Tati Yulia., Utomo, Supri Wahyudi., dan Nurainan, Elva. (2017). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI). *The 9<sup>th</sup> Fipa: Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi – Universitas PGRI Madiun*, vol. 5 No 1, Hlmn. 804-817.
- Pedoman Penulisan Skripsi*. 2015. Fakultas Ekonomi Uin Maulana malik Ibrahim Malang.
- Perdani, Venny Maulidah. (2016). **Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja keuangan Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2014**, Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Prasetyantoko, A. 2002. *Corporate Governance (Pendekatan Institusional)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Prayogo, Kosyi Hadi. (2015). **Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2014)**, Skripsi. Fakultas Ekonomika & Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.

- Ruddian, Elsiana. 2017. **Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran pajak pada Perusahaan Pertambanfan yang Terdaftar di Buesa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2015**, Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Sari, Gusti Maya. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2008-2012), *Artikel*. Fakultas Ekonomi Universtas Negeri Padang.
- Sari, Yoli Oktafiani. 2016. **Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada perusahaan manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014)**, Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang.
- Santoso, Titus Bayu., Muid, Dul. (2014). Pengaruh Corporatr Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol. 3 No. 4.
- Sedarmayanti. 2007. *Good Governance (keperintahan yang baik) dan Good Corporate Governance (tata kelola perusahaan yang baik)*. Bandung: v. Mandar Maju.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metode Penelitian untuk Bisnis* (4 ed). Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Jupri. 2015. **Pengaruh Karakter Eksekutif dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI)**, Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia, Bandung.
- Silaen, Andri. 2016. **Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014)**, Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Soraya, Rezki Astuti. 2012. **Good Corporate Governance dalam Perspektif Islam dan Penerapannya pada Bisnis Syariah di Indonesia**. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Subagiastra, Komang., Arizona, I Putu., Kusuma, I Nyoman. 2016. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol.1 No.2 Hal: 167-193.

Sujarwendi, Wiratna, V. 2015. *Metodologi Penelitian (Bisnis & Ekonomi)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Surya, Indra & Yustiavandana, Ivan. 2008. *Penerapan Corporate Governance (Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi kelangsungan Usaha)*. Jakarta: Prenada Media Group.

Sutedi, Adrian. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta : Sinar Grafika.

Tandean, Vivi Adeyani. (2016). Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Pengaruhnya pada Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 11 No.1.

Wibawa, Agung., Wilopo., Abdillah, Yusri. 2016. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Terdaftar di Indeks Bursa SRI KEHATI tahun 2010-2014). *Jurnal Perpajakan*, Vol.11 No.1.

Widyaningsih, Aristanti. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan (dengan pendekatan Mind Map)*. Bandung: Alfabeta.

Wijayaning, Dianing Ratna. 2016. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2014). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, Vol. 13 No. 20.

Winata, Fenny. 2014. Penfaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax & Accounting Review*, Vol.4 No. 1.

Warsono, sony., Amalia, Fitri., dan Rahajeng, Dian Kartika. 2009. *Corporate Governance Concept And Model*. Yogyakarta: Center for Good Corporate Governance fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Yuono, Citra Ayuning Sari. 2016. Pengaruh Perencanaan Pajak dan Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 5, Nomor 6.

Zarkasyi, Moh. Wahyudin. 2008. *Good Corporate Governance pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3755820/ini-modus-penghindaran-pajak-yang-diduga-dilakukan-gucci>, diakses 26 juni 2018.

<http://modulmakalah.blogspot.co.id/2016/12/Pengertian.dan.Pendekatan.Teori.Stakeholder.Menurut.Para.Ahli.html>, diakses 03 April 2018.

<http://www.akuntansilengkap.com/bisnis/pengertian-stakeholder-teori-analisis-dan-contoh/>, diakses 03 April 2018.

<https://www.statistikian.com/2017/01/uji-asumsi-klasik-regresi-linear-spss.html>  
diakses 12 Februari 2018

[www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

[www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)



**Lampiran I**

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Robiatus Salamah

Nim/Jurusan : 14520101/Akuntansi

Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si

Judul Skripsi : Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di LQ45

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	16-11-2017	Menyerahkan surat SK bimbingan ke pembimbing	1.
2	20-11-2017	Konsultasi Judul	2.
3	24-11-2017	Konsultasi Judul (ACC)	3.
4	27-11-2017	Konsultasi Bab I, II, III	4.
5	28-11-2017	Konsultasi	5.
6	5-12-2017	Konsultasi	6.
7	15-12-2017	Konsultasi Revisi Proposal	7.
8	29-12-2017	Konsul Proposal (ACC)	8.
9	12-01-2018	Konsultasi Revisi Proposal	9.
10	15-01-2018	Konsultasi	10.
11	18-01-2018	Konsultasi	11.
12	22-01-2018	ACC proposal setelah revisi	12.
13	25-02-2018	Konsultasi bab IV	13.
14	05-02-2018	Konsultasi bab IV	14.
15	09-02-2018	Konsultasi bab IV (ACC kompre)	15.
16	10-01-2018	Konsultasi bb IV & V	16.
17	28-03-2018	Konsultasi	17.
18	06-04-2018	Acc Skripsi	18.

Malang, 26 Juni 2018

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hj. Nanik Wahyuni SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

## Lampiran 2

### BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Robiatus Salamah  
Tempat Tanggal Lahir : Gresik, 16 November 1994  
Alamat Asal : Dusun Krajan 02 RT. 01 RW. 07 Pangkah Wetan Ujungpangkah Gresik  
Alamat Kos : Jalan Sunan Kalijaga No. 22 Lowokwaru, Malang  
Telepon/Hp : 082137458999  
E-mail : [robiatussalamah1@gmail.com](mailto:robiatussalamah1@gmail.com)

#### Pendidikan Formal

1999-2001 : TK Islamiyah Ujungpangkah Gresik  
2001-2007 : MI Islamiyah Ujungpangkah Gresik  
2007-2010 : MTs Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan  
2010-2013 : MA Kanjeng Sepuh Sidayu Gresik  
2014-2018 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

#### Pendidikan Non Formal

2007-2010 : Madrasah Diniyah Tarbiyatut Tholabah  
2014-2015 : Program Khusus Pendidikan Bahasa Arab UIN Maliki Malang  
2015-2016 : English Language Center (ELC) UIN Maliki Malang

Malang, 27 Juni 2018

Robiatus Salamah

### LAMPIRAN 3

#### Daftar Sampel Perusahaan

No	Code	Perusahaan
1	ANTM	Aneka Tambang Tbk.
2	BBCA	Bank Central Asia Tbk.
3	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk.
4	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk.
5	GGRM	Gudang Garam Tbk.
6	HSMP	HM Sampoerna Tbk.
7	ICBP	Indofood CBP Sukses makmur Tbk.
8	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.
9	KLBF	Kalbe Farma Tbk.
10	LPKR	Lippo Karawaci Tbk.
11	LPPF	Matahari Department Store Tbk.
12	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.
13	PTPP	PP (Persero) Tbk.
14	PWON	Pakuwon Jati Tbk.
15	SILO	Siloam International Hospitals
16	UNTR	United Tractors Tbk.
17	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.

**LAMPIRAN 4**

**Data Perhitungan Variabel Independen dan Variabel Dependen  
tahun2014-2016**

NO	Nama	Tahun	Penghindaran Pajak	Dewan Komisaris	Kepemilikan Manajerial (%)	Kepemilikan Institusional (%)
1	ANTM	2016	-0,139406	0,500000	0,000259	0,191226
1	ANTM	2015	-0,136583	0,500000	0,000259	0,179252
1	ANTM	2014	-0,069435	0,500000	0,000500	0,082618
5	GGRM	2016	-0,252874	1,000000	0,000673	0,755469
5	GGRM	2015	-0,252736	1,000000	0,000920	0,755469
5	GGRM	2014	-0,251262	1,000000	0,000920	0,755469
4	CPIN	2016	-0,434738	0,333333	0,000215	1,544494
4	CPIN	2015	-0,196802	0,666667	0,000231	0,555335
4	CPIN	2014	-0,170986	0,200000	0,000000	0,555335
2	BBCA	2016	-0,201512	1,500000	0,000606	0,471547
2	BBCA	2015	-0,203969	1,500000	0,000242	0,471547
2	BBCA	2014	-0,203916	1,500000	0,000243	0,471547
6	HSMP	2016	-0,249786	0,666667	0,000017	0,925000
6	HSMP	2015	-0,256185	1,000000	0,000430	0,925000
6	HSMP	2014	-0,257847	1,000000	0,000456	0,981786
3	BBNI	2016	-0,202246	0,600000	0,000289	0,382291
3	BBNI	2015	-0,202041	1,000000	0,000232	0,363980
3	BBNI	2014	-0,199266	0,600000	0,000738	0,377509
7	ICBP	2016	-0,272176	1,000000	0,000171	0,805329
7	ICBP	2015	-0,270969	1,000000	0,000343	0,805329
7	ICBP	2014	-0,252910	0,750000	0,000343	0,805329
8	INDF	2016	-0,342948	0,600000	0,000157	0,500671
8	INDF	2015	-0,348719	0,600000	0,000157	0,500671
8	INDF	2014	-0,293487	0,600000	0,000157	0,500671
9	KLBF	2016	-0,239488	0,750000	0,000093	0,565091
9	KLBF	2015	-0,243740	0,400000	0,000093	0,566868
9	KLBF	2014	-0,236177	0,500000	0,000093	0,567135
10	LPKR	2016	-0,212084	2,000000	0,000065	0,400057
10	LPKR	2015	-0,202913	1,000000	0,000065	0,231345
10	LPKR	2014	-0,151493	1,250000	0,000065	0,231345
11	LPPF	2016	-0,202538	0,285714	0,000000	0,174779
11	LPPF	2015	-0,206686	0,333333	0,000000	0,204779
11	LPPF	2014	-0,233135	0,250000	0,000000	0,346538
12	PTBA	2016	-0,249363	0,200000	0,000081	0,231371

12	PTBA	2015	-0,235260	0,500000	0,000083	0,214514
12	PTBA	2014	-0,245076	1,000000	0,000069	0,315450
13	PTPP	2016	-0,324122	2,000000	0,000000	0,449278
13	PTPP	2015	-0,343269	0,250000	0,000000	0,467643
13	PTPP	2014	-0,421319	0,666667	0,000000	0,460664
14	PWON	2016	0,028001	2,000000	0,000366	0,561304
15	SILO	2016	-0,427130	0,600000	0,000128	0,770923
15	SILO	2015	-0,416472	0,750000	0,000144	0,708243
15	SILO	2014	-0,361465	1,333333	0,000144	0,788513
16	UNTR	2016	-0,241537	0,500000	0,000057	0,652878
16	UNTR	2015	-0,333983	0,500000	0,000057	0,594970
16	UNTR	2014	-0,269092	1,333333	0,000057	0,594970
17	UNVR	2016	-0,254461	1,500000	0,000023	0,988927
14	PWON	2015	-0,017253	2,000000	0,000366	0,521795
17	UNVR	2015	-0,252594	0,666667	0,000023	0,139260
14	PWON	2014	-0,090989	2,000000	0,000246	0,575971
17	UNVR	2014	-0,252477	1,500000	0,000023	0,849918



## LAMPIRAN 5

Tabel Durbin-Watson (DW) 5%

Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$										
n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU								
6	0.6102	1.4002								
7	0.6996	1.3564	0.4672	1.8964						
8	0.7629	1.3324	0.5591	1.7771	0.3674	2.2866				
9	0.8243	1.3199	0.6291	1.6993	0.4548	2.1282	0.2957	2.5881		
10	0.8791	1.3197	0.6972	1.6413	0.5253	2.0163	0.3760	2.4137	0.2427	2.8217
11	0.9273	1.3241	0.7580	1.6044	0.5948	1.9280	0.4441	2.2833	0.3155	2.6446
12	0.9708	1.3314	0.8122	1.5794	0.6577	1.8640	0.5120	2.1766	0.3796	2.5061
13	1.0097	1.3404	0.8612	1.5621	0.7147	1.8159	0.5745	2.0943	0.4445	2.3897
14	1.0450	1.3503	0.9054	1.5507	0.7667	1.7788	0.6321	2.0296	0.5052	2.2959
15	1.0770	1.3605	0.9455	1.5432	0.8140	1.7501	0.6852	1.9774	0.5620	2.2198
16	1.1062	1.3709	0.9820	1.5386	0.8572	1.7277	0.7340	1.9351	0.6150	2.1567
17	1.1330	1.3812	1.0154	1.5361	0.8968	1.7101	0.7790	1.9005	0.6641	2.1041
18	1.1576	1.3913	1.0461	1.5353	0.9331	1.6961	0.8204	1.8719	0.7098	2.0600
19	1.1804	1.4012	1.0743	1.5355	0.9666	1.6851	0.8588	1.8482	0.7523	2.0226
20	1.2015	1.4107	1.1004	1.5367	0.9976	1.6763	0.8943	1.8283	0.7918	1.9908
21	1.2212	1.4200	1.1246	1.5385	1.0262	1.6694	0.9272	1.8116	0.8286	1.9635
22	1.2395	1.4289	1.1471	1.5408	1.0529	1.6640	0.9578	1.7974	0.8629	1.9400
23	1.2567	1.4375	1.1682	1.5435	1.0778	1.6597	0.9864	1.7855	0.8949	1.9196
24	1.2728	1.4458	1.1878	1.5464	1.1010	1.6565	1.0131	1.7753	0.9249	1.9018
25	1.2879	1.4537	1.2063	1.5495	1.1228	1.6540	1.0381	1.7666	0.9530	1.8863
26	1.3022	1.4614	1.2236	1.5528	1.1432	1.6523	1.0616	1.7591	0.9794	1.8727
27	1.3157	1.4688	1.2399	1.5562	1.1624	1.6510	1.0836	1.7527	1.0042	1.8608
28	1.3284	1.4759	1.2553	1.5596	1.1805	1.6503	1.1044	1.7473	1.0276	1.8502
29	1.3405	1.4828	1.2699	1.5631	1.1976	1.6499	1.1241	1.7426	1.0497	1.8409
30	1.3520	1.4894	1.2837	1.5666	1.2138	1.6498	1.1426	1.7386	1.0706	1.8326
31	1.3630	1.4957	1.2969	1.5701	1.2292	1.6500	1.1602	1.7352	1.0904	1.8252
32	1.3734	1.5019	1.3093	1.5736	1.2437	1.6505	1.1769	1.7323	1.1092	1.8187
33	1.3834	1.5078	1.3212	1.5770	1.2576	1.6511	1.1927	1.7298	1.1270	1.8128
34	1.3929	1.5136	1.3325	1.5805	1.2707	1.6519	1.2078	1.7277	1.1439	1.8076
35	1.4019	1.5191	1.3433	1.5838	1.2833	1.6528	1.2221	1.7259	1.1601	1.8029
36	1.4107	1.5245	1.3537	1.5872	1.2953	1.6539	1.2358	1.7245	1.1755	1.7987
37	1.4190	1.5297	1.3635	1.5904	1.3068	1.6550	1.2489	1.7233	1.1901	1.7950
38	1.4270	1.5348	1.3730	1.5937	1.3177	1.6563	1.2614	1.7223	1.2042	1.7916
39	1.4347	1.5396	1.3821	1.5969	1.3283	1.6575	1.2734	1.7215	1.2176	1.7886
40	1.4421	1.5444	1.3908	1.6000	1.3384	1.6589	1.2848	1.7209	1.2305	1.7859
41	1.4493	1.5490	1.3992	1.6031	1.3480	1.6603	1.2958	1.7205	1.2428	1.7835
42	1.4562	1.5534	1.4073	1.6061	1.3573	1.6617	1.3064	1.7202	1.2546	1.7814
43	1.4628	1.5577	1.4151	1.6091	1.3663	1.6632	1.3166	1.7200	1.2660	1.7794
44	1.4692	1.5619	1.4226	1.6120	1.3749	1.6647	1.3263	1.7200	1.2769	1.7777
45	1.4754	1.5660	1.4298	1.6148	1.3832	1.6662	1.3357	1.7200	1.2874	1.7762
46	1.4814	1.5700	1.4368	1.6176	1.3912	1.6677	1.3448	1.7201	1.2976	1.7748
47	1.4872	1.5739	1.4435	1.6204	1.3989	1.6692	1.3535	1.7203	1.3073	1.7736
48	1.4928	1.5776	1.4500	1.6231	1.4064	1.6708	1.3619	1.7206	1.3167	1.7725
49	1.4982	1.5813	1.4564	1.6257	1.4136	1.6723	1.3701	1.7210	1.3258	1.7716
50	1.5035	1.5849	1.4625	1.6283	1.4206	1.6739	1.3779	1.7214	1.3346	1.7708
51	1.5086	1.5884	1.4684	1.6309	1.4273	1.6754	1.3855	1.7218	1.3431	1.7701
52	1.5135	1.5917	1.4741	1.6334	1.4339	1.6769	1.3929	1.7223	1.3512	1.7694
53	1.5183	1.5951	1.4797	1.6359	1.4402	1.6785	1.4000	1.7228	1.3592	1.7689
54	1.5230	1.5983	1.4851	1.6383	1.4464	1.6800	1.4069	1.7234	1.3669	1.7684
55	1.5276	1.6014	1.4903	1.6406	1.4523	1.6815	1.4136	1.7240	1.3743	1.7681
56	1.5320	1.6045	1.4954	1.6430	1.4581	1.6830	1.4201	1.7246	1.3815	1.7678

57	1.5363	1.6075	1.5004	1.6452	1.4637	1.6845	1.4264	1.7253	1.3885	1.7675
58	1.5405	1.6105	1.5052	1.6475	1.4692	1.6860	1.4325	1.7259	1.3953	1.7673
59	1.5446	1.6134	1.5099	1.6497	1.4745	1.6875	1.4385	1.7266	1.4019	1.7672
60	1.5485	1.6162	1.5144	1.6518	1.4797	1.6889	1.4443	1.7274	1.4083	1.7671
61	1.5524	1.6189	1.5189	1.6540	1.4847	1.6904	1.4499	1.7281	1.4146	1.7671
62	1.5562	1.6216	1.5232	1.6561	1.4896	1.6918	1.4554	1.7288	1.4206	1.7671
63	1.5599	1.6243	1.5274	1.6581	1.4943	1.6932	1.4607	1.7296	1.4265	1.7671
64	1.5635	1.6268	1.5315	1.6601	1.4990	1.6946	1.4659	1.7303	1.4322	1.7672
65	1.5670	1.6294	1.5355	1.6621	1.5035	1.6960	1.4709	1.7311	1.4378	1.7673
66	1.5704	1.6318	1.5395	1.6640	1.5079	1.6974	1.4758	1.7319	1.4433	1.7675
67	1.5738	1.6343	1.5433	1.6660	1.5122	1.6988	1.4806	1.7327	1.4486	1.7676
68	1.5771	1.6367	1.5470	1.6678	1.5164	1.7001	1.4853	1.7335	1.4537	1.7678
69	1.5803	1.6390	1.5507	1.6697	1.5205	1.7015	1.4899	1.7343	1.4588	1.7680

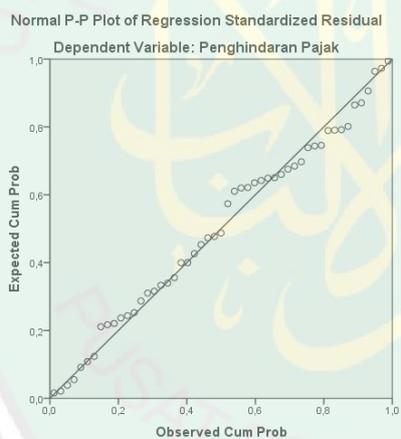
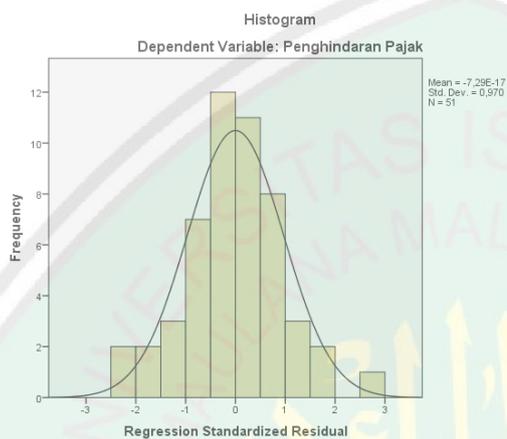


**LAMPIRAN 6**

**HASIL UJI SPSS**

**Uji Asumsi Klasik**

**1. Uji Normalitas**



**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

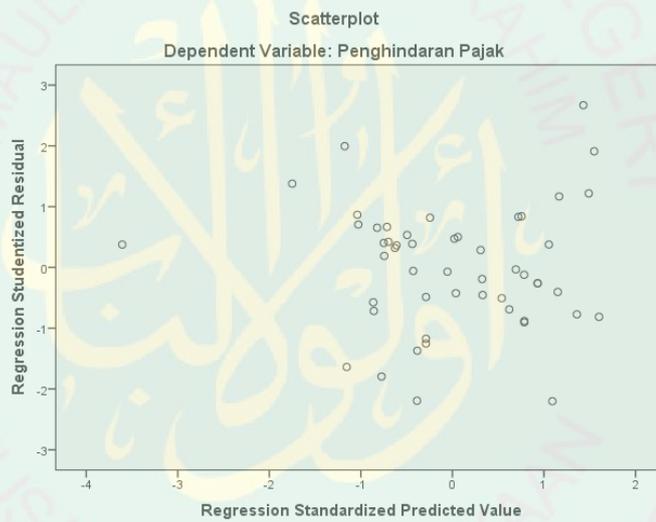
		Unstandardized Residual
N		51
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,07077776

Most Extreme Differences	Absolute	,084
	Positive	,074
	Negative	-,084
Kolmogorov-Smirnov Z		,601
Asymp. Sig. (2-tailed)		,863

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

## 2. Uji Heteroskedastisitas



## Uji Glejser

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,041	,016		2,505	,016
	Dewan Komisaris Independen	,020	,012	,243	1,682	,099

Kepemilikan Institusional	,003	,023	,016	,114	,910
Kepemilikan Manajerial	-21,132	27,179	-,113	-,777	,441

a. Dependent Variable: absolute.residual

### 3. Uji Multikolinearitas

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-,225	,028		-8,139	,000		
1 Dewan Komisaris Independen	,065	,020	,363	3,193	,003	,958	1,044
Kepemilikan Institusional	-,180	,038	-,535	-4,686	,000	,952	1,050
Kepemilikan Manajerial	110,378	46,162	,274	2,391	,021	,943	1,060

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

### 4. Uji Autokorelasi

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,646 <sup>a</sup>	,417	,380	,07300169	1,875

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

## Deskriptif Statistik

## Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penghindaran Pajak	51	-,43474	,02800	-,2411552	,09269991
Dewan Komisaris Independen	51	,20000	2,00000	,8957983	,51936504
Kepemilikan Institusional	51	,08262	1,54449	,5458315	,27571677
Kepemilikan Manajerial	51	,00000	,00092	,0002138	,00023030
Valid N (listwise)	51				

## Uji Normalitas Variabel Dependen dan Independen

## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Penghindaran Pajak	Dewan Komisaris Independen	Kepemilikan Institusional	Kepemilikan Manajerial
N	51	51	51	51
Normal Parameters <sup>a,b</sup>				
Mean	-,2411552	,8957983	,5458315	,0002138
Std. Deviation	,09269991	,51936504	,27571677	,00023030
Most Extreme Differences				
Absolute	,159	,166	,116	,177
Positive	,159	,166	,116	,167
Negative	-,154	-,090	-,051	-,177
Kolmogorov-Smirnov Z	1,138	1,183	,825	1,261
Asymp. Sig. (2-tailed)	,150	,122	,504	,083

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

## Analisis Regresi Linier Berganda

### Regression

#### Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional <sup>b</sup>	.	Enter

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

b. All requested variables entered.

#### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,646 <sup>a</sup>	,417	,380	,07300169

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional

#### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,179	3	,060	11,208	,000 <sup>b</sup>
	Residual	,250	47	,005		
	Total	,430	50			

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

b. Predictors: (Constant), Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
(Constant)	-,225	,028		-8,139	,000			
1 Dewan Komisaris Independen	,065	,020	,363	3,193	,003	,335	,422	,356
Kepemilikan Institusional	-,180	,038	-,535	-4,686	,000	-,432	-,564	-,522
Kepemilikan Manajerial	110,378	46,162	,274	2,391	,021	,236	,329	,266

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak